

PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2017



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

Provinsi

TAHUN 2017

Halaman baru, mengikuti sampul.

Kata Pengantar (maksimum 2 halaman)

Halaman baru, mengikuti
Kata Pengantar. Daftar Isi.

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

Kota

Provinsi.....

TAHUN 2017

Halaman baru, mengikuti sampul.

Kata Pengantar (maksimum 2 halaman)

Halaman baru, mengikuti.

Kata Pengantar. Daftar Isi.

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

Kabupaten

Provinsi.....

TAHUN 2017

Halaman baru, mengikuti sampul.

Kata Pengantar (maksimum 2 halaman)

Halaman baru, mengikuti Kata Pengantar.

Daftar Isi.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum** (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan);
- B. Gambaran Umum Daerah;**
- C. Kondisi Geografis Daerah;** batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu;
- D. Gambaran Umum Demografis;** jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan;
- E. Kondisi Ekonomi:**
 - a. Potensi Unggulan Daerah.
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir).

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

- A. Visi dan Misi**
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**
- C. Prioritas Daerah**

BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- A. Urusan Konkuren.**
 - a. Ringkasan Urusan Wajib**
 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
 2. Program dan Kegiatan
 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
 8. Permasalahan dan Solusi
 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

b. Ringkasan Urusan Pilihan

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
2. Program dan Kegiatan
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan dan Solusi
9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

1. Perangkat Daerah Pelaksana
2. Program dan Kegiatan
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
7. Permasalahan dan Solusi
8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

1. Perangkat Daerah Pelaksana
2. Program dan Kegiatan
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
7. Permasalahan dan Solusi
8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Indikator kinerja kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran I.1, Pemerintah Kota Lampiran II.1 dan Pemerintah Kabupaten Lampiran III.1 (terlampir)

2. Tataran Pelaksana Kebijakan:

1) Administrasi Umum (8 Aspek)

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran I.2, Pemerintah Kota Lampiran II.2, dan Pemerintah Kabupaten Lampiran III.2 (terlampir).

2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

a) Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kebijakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan merupakan bagian daripada IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

b) Yang termasuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu badan (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi penunjang lainnya), fungsi kesekretariatan (Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD), kantor dan kecamatan.

3) Urusan Pemerintahan Umum

a) Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kebijakan urusan pemerintahan umum merupakan bagian

daripada IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

b) Yang termasuk Urusan Pemerintahan Umum yaitu Kesbangpol.

4) **Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.**

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran I.3, Pemerintah Kota Lampiran II.3 dan Pemerintah Kabupaten Lampiran III.3 (terlampir).

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

Penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

BAB V TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program dan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
9. Permasalahan dan Solusi
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten/Kota.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Daerah yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (*Output*) dari Kerjasama
10. Permasalahan dan Solusi
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal yang Terlibat
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
8. Hasil dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
10. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
8. Potensi Bencana yang Diperkirakan terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, sapatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
4. Penanggulangan dan kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamana dalam Penanggulangan
6. Sumber dan Jumlah Anggaran

BAB VII PENUTUP

Manual ini merupakan alat panduan bagi Pemerintah Daerah, Khususnya para penyusun LPPD agara penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota lebih terstruktur dan dapat menyajikan sebuah data yang dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Daerah.

TATA CARA PENYUSUNAN LPPD



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7-8
JAKARTA PUSAT 10110

BAB I

PENGISIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Format IKK yang akan dikerjakan, harap dibaca dengan teliti dan seksama. Dari cara pengisiannya, IKK dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

1. IKK Yang Menggunakan Rumus Persamaan;

Capaian kinerja IKK yang menggunakan rumus persamaan dengan satuan “persentase” dan “rasio”, dll.

2. IKK Yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan;

Capaian kinerja yang tidak menggunakan rumus persamaan dengan pernyataan “Ada atau tidak ada”, “tepat atau tidak tepat”, “sesuai atau tidak sesuai”, jumlah, lama waktu, dll.

1.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN.

1. Perhatikan, baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Apa dan bagaimana rumus persamaan IKK diuraikan. Pastikan jawabannya.
2. Tulis data dan informasi (angka) dari masing-masing elemen persamaan, mengikuti tulisan rumus dan hitung **pada kolom 6** (Rumus/Perhitungan).
3. Tulis elemen-elemen data dan informasi kinerja pada kolom “Jenis data”.
4. Tulis hasil perhitungan capaian kinerja, pada kolom “Capaian Kinerja”.
5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”

Contoh 1 : Hasil Pengisian IKK no 2: Rasio Rumah Ber IMB.

$$\text{Rasio Rumah ber – IMB} = \frac{\text{Jumlah Rumah ber IMB}}{\text{Jumlah Rumah seluruhnya}} \times 100 = .. \%$$

Rasio Rumah ber-IMB = % adalah capaian kinerja yang diminta/diisi.

Elemen data

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Rumah ber IMB} &= 20.000 \text{ unit} \\ \text{Jumlah Rumah seluruhnya} &= 100.000 \text{ unit} \end{aligned}$$

Catatan: Elemen data ini diperoleh dari sumber Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya.

$$\text{Rasio Rumah ber – IMB} = \frac{20.000}{100.000} \times 100 = 20 \%$$

Berdasarkan elemen data yang diperoleh, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan, maka diperoleh hasil perhitungan IKK - Rasio Rumah ber- IMB = 20%.

Contoh 1 : Lampiran IKK no 2 : Rasio Rumah Ber-IMB

No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket.
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Rasio Rumah ber IMB	$\frac{\text{Jumlah rumah ber IMB}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	Jumlah Rumah ber IMB = 20.000 unit Jumlah Rumah seluruhnya = 100.000 unit	20% ($\frac{20.000}{100.000} \times 100\% = 20\%$)	

1.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
2. Tulis pernyataan hasil perumusan pada kolom “Rumus/Perhitungan”.
3. Tulis elemen data dan informasi dukungan pernyataan pada kolom “Jenis data”.
4. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.
5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”.

Contoh 2: Hasil Pengisian IKK Nomor 9: Ketepatan waktu penyampaian.

No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data Tahun 2016*)	Capaian Kinerja	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Bukti pengiriman : LPPD tahun 2017 disampaikan pada tanggal ----- sesuai dengan bukti copy surat tanda terima nomor -----	TEPAT	

*) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian informasi kapan diserahkan.

Contoh 3: Hasil Pengisian IKK Nomor 11 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya.

No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data Tahun 2017*)	Capaian Kinerja	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND 6 Urusan	Urusan yang sudah ada SPM nya sesuai dengan Perkada nomor tahun ttg... sebanyak 6 urusan, sbb : 1) Urusan Pendidikan; 2) Urusan Kesehatan; dan 3) Urusan PU dan Panataan Ruang 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5) Trantibum dan Linmas 6) Urusan Sosial	6 urusan	

*) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian urusan apa yang dilaksanakan.

BAB II

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

IKK Tataran Pengambil Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul: Lampiran I.1. Lampiran II.1. dan Lampiran III.1. Format IKK untuk provinsi, kota dan kabupaten, dengan judul “Tataran Pengambil Kebijakan” dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017.

Contoh :

Lampiran III. 1: Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut:

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

Kabupaten: -----

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/ Perhitunga	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

2.1. PENJELASAN FORMAT

Format IKK Untuk Kabupaten, “Tataran Pengambil Kebijakan”.

Dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017 (Lampiran III.1), terdiri dari beberapa baris/lajur dan kolom. Masing-masing baris menunjukkan aspek, focus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolom-kolom atau sel isian. Format terdiri dari 9 kolom.

1. Kolom (1), (2), (3), (4) dan, (5) IKK, adalah kolom tentang aspek, fokus dan IKK kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi.
2. Kolom isian adalah kolom (6), (7), (8), dan (9).
3. Kolom (6) Rumus/Perhitungan. Sel pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8).
4. Kolom (7) Jenis data, sel pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya, Informasi keberadaan Perda nomor --- tahun --- tentang ---. Uraian elemen-elemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang menggunakan persamaan.

5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Sel pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan, atau pernyataan berdasarkan perhitungan pada kolom (6).
6. Kolom (9) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan.

2.2. PETUNJUK UMUM PENGISIAN

1. Format ini terdiri dari aspek-aspek, masing-masing aspek dibagi ke dalam focus, dan focus terdiri IKK-IKK. Keseluruhan Tataran Pengambil Kebijakan untuk Kabupaten sebanyak 44 IKK.
2. Data dan informasi capaian kinerja IKK, bersumber dari dan diisi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. IKK yang data dan informasi capaian kinerjanya bersumber dari beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya, pengisian dilakukan secara koordinatif.
4. Hasil pengisian format/IKK, agar disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyusun LPPD, untuk diolah menjadi LPPD.

2.3. PETUNJUK PENGISIAN

1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK tersebut menggunakan rumus persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan.
2. IKK yang Menggunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang Menggunakan Rumus Persamaan.
3. IKK yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan.

2.3.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data capaian kinerja yang diminta.
2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan dan hitung, pada kolom "Rumus/Perhitungan". Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya.
3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom "Jenis data".
4. Tulis hasil perhitungan pada kolom "Capaian Kinerja".
5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

Contoh 4: Hasil Pengisian IKK nomor 18 Belanja untuk urusan pendidikan dan Kesehatan

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket.
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Belanja untuk pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah Belanja APBD x 100%=	Realisasi Belanja Pendidikan = Rp. 10 M Realisasi Belanja Kesehatan = Rp. 11 M Jumlah belanja = Rp. 21 M Jumlah Belanja APBD = Rp. 100 M	21 % $(\frac{21M}{100 M} \times 100 = 21\%)$	

2.3.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN.

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data capaian kinerja yang diminta.
2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom "Rumus/Perhitungan".
3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom "Capaian Kinerja".
4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

Contoh 5 : Hasil Pengisian IKK nomor 21 Sistem Informasi Kepegawaian.

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidaknya data base kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten -----	Ada	

BAB III

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM

IKK untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul : Lampiran I.2. (provinsi), Lampiran II.2. (Kota) dan Lampiran III.2. (Kabupaten).

Contoh: Lampiran III. 2

Format Isian Kabupaten, sebagai berikut :

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN:

NAMA PERANGKAT DAERAH:

(Sebutkan nama Perangkat Daerah).

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah ybs).

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Format IKK untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, terdiri dari beberapa bentuk yaitu untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 1 urusan dan untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan.

Contoh tabel di atas adalah untuk **Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 1 urusan.**

3.1. PENJELASAN FORMAT

Format IKK terdiri dari beberapa kolom dan baris/lajur. Masing-masing baris menunjukkan aspek, fokus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolom-kolom isian. Format isian terdiri dari 21 IKK pada baris dan 9 kolom.

1. Kolom (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) adalah kolom tentang aspek, fokus, IKK dan rumus. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi.
2. Kolom isian adalah kolom (7), (8), dan (9).
3. Kolom (6): Rumus/Perhitungan. Pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8).
4. Kolom (7) Jenis data, pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan.

Misalnya, Informasi keberadaan Perda nomor --- tahun --- tentang ---. Uraian elemen-elemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang menggunakan persamaan.

5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan atau pernyataan, berdasarkan perhitungan pada kolom (6). Kolom (9) merupakan informasi tambahan penjelasan, jika diperlukan.

3.2. PETUNJUK UMUM

1. Format IKK pada 8 Aspek Administrasi Umum, diisi oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada.
2. Perangkat Daerah ada yang menyelenggarakan 1 (satu) urusan saja, atau 1 sub bidang urusan, atau yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan.
3. Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut:

KABUPATEN : di isi sesuai dengan nama kabupaten

NAMA PERANGKAT DAERAH : di isi dengan nama Perangkat Daerah

Urusan-Urusan yang dilaksanakan : Tulis Urusan Yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Contoh: Hasil Pengisian

Kabupaten : Bantul

Nama Perangkat Daerah : dinas kesehatan

Urusan Yang Dilaksanakan : Kesehatan

4. Format ini diisi oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Karena yang dinilai adalah kinerja Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan wajib atau pilihan, sehingga data dan informasi kinerja yang diminta adalah hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Perangkat Daerah wajib mengisi capaian kinerja.
5. Sebelum pengisian IKK harap memperhatikan jenis IKK yang akan diisi. Apakah masuk IKK yang menggunakan rumus persamaan atau IKK yang tidak menggunakan rumus persamaan.
6. Setelah selesai diisi, diminta agar Kepala atau Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan melakukan reviu terhadap kebenaran hasil pengisian untuk persetujuan. Perangkat Daerah diminta mendokumentasikan data informasi yang diserahkan.
7. Hasil pengisian diserahkan secepatnya kepada bagian tata pemerintahan atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyusun LPPD. Perlu diketahui bahwa penyusun LPPD masih memerlukan waktu klarifikasi, penggabungan dan lainnya ke dalam LPPD.

8. Kontrol bagi penyusun LPPD: jumlah format isian Lampiran III.2 Tataran Pelaksana Kebijakan yang terdiri dari 8 Aspek Administrasi Umum harus sama dengan jumlah Perangkat Daerah dan Bagian yang menangani urusan yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah.

9. Bagi Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Lebih Dari 1 Urusan.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan, maka Format isian dapat dimodifikasi dengan menambah/menyisip/insert kolom baru pada masing-masing kolom (jenis data) dan kolom (capaian kinerja) sesuai dengan banyak urusan yang diselenggarakan. Untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 2 urusan dapat dilihat format hasil modifikasinya, sedangkan untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan lebih 2 urusan agar dimodifikasi sendiri.

Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut :

KABUPATEN : diisi sesuai dengan nama pemerintah kabupaten

Nama Perangkat Daerah : diisi dengan nama

URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1) Urusan -----

2) Urusan -----

3) Urusan -----dst

Contoh hasil modifikasi

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM
RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KABUPATEN : TANGERANG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1) PERINDUSTRIAN,

2) PERDAGANGAN

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Keterangan
						Perindustrian	Perdagangan	Perindustrian	Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)

3.3. PETUNJUK PENGISIAN:

1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK menggunakan rumus persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan.
2. IKK yang **Menggunakan Rumus Persamaan**, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK **yang menggunakan rumus persamaan**.
3. IKK yang **Tidak Menggunakan Rumus Persamaan**, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang **Tidak Menggunakan Rumus Persamaan**.

3.3.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN.

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data capaian kinerja yang diminta.
2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya.
3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom "Jenis data".
4. Tulis proses dan hasil perhitungannya pada kolom "Capaian Kinerja".
5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

Contoh 6: (contoh pengisian 1 Perangkat Daerah melaksanakan 1 (satu) urusan):

Hasil Pengisian IKK nomor 13, Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD.

No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total Belanja APBD x 100%	Anggaran belanja Perangkat Daerah = Rp. 2 M Total APBD = Rp. 350 M	0,571% $(\frac{2 \text{ M}}{350 \text{ M}} \times 100\% = 0,571\%)$	Unit Keuangan

Contoh 7 : (contoh pengisian 1 Perangkat Daerah melaksanakan lebih dari 1 (satu) urusan):

Pengisian IKK nomor 13. Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD.

No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket.
			Perindustrian	Perdagangan	Perindustrian	Perdagangan	
(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Anggaran Perangkat Daerah = Rp. 2M Total APBD = Rp. 350 M	Anggaran Perangkat Daerah = Rp. 1M Total APBD = Rp. 350 M	0,571% $(\frac{1 \text{ M}}{350 \text{ M}} \times 100\% = 0,571\%)$	0,571% $(\frac{1 \text{ M}}{350 \text{ M}} \times 100\% = 0,571\%)$	Dispenda

3.3.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan apa jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta.
2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom "Rumus/Perhitungan".
3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom "Capaian Kinerja".
4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

Contoh 8: (contoh pengisian 1 Perangkat Daerah melaksanakan 1 (satu) urusan):

IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah SOP buah	SOP : Perijinan	1	

Contoh 8: (contoh pengisian 1 Perangkat Daerah melaksanakan lebih dari 1(satu) urusan):

IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
			Perindustri an	perdagangan	Perindustri an	perdagangan	
(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
13	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah SOP 2 .buah	SOP : 1. Ijin Industri	SOP : 1. Ijin Usaha Perdagangan	1	1	

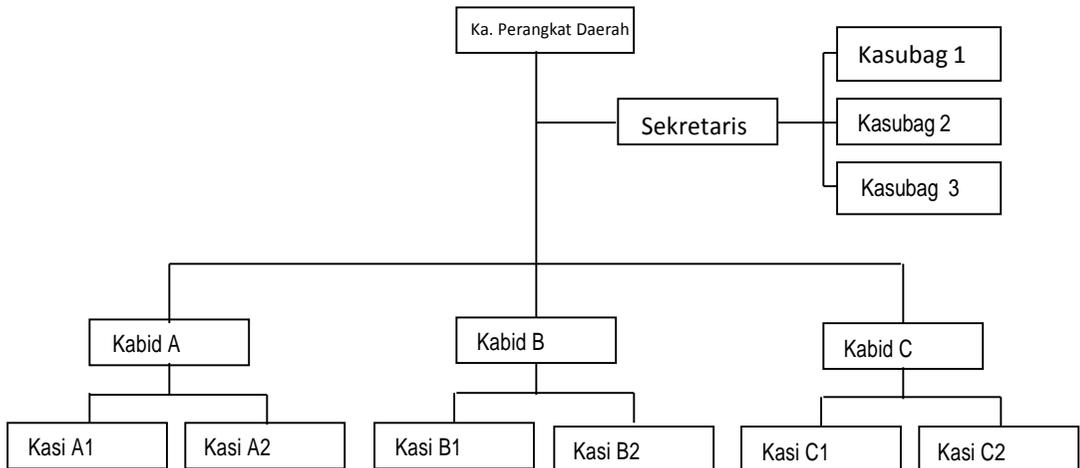
3.4. PENJELASAN KHUSUS.

1. Untuk membantu penyusun LPPD, perlu penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi, kaitannya dengan urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Informasi ini dapat dilihat pada dokumen perencanaan dan penganggaran, APBD serta Laporan Keuangan Daerah (*unaudited*).
2. Bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan, melakukan pemilahan atas urusan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - a. Perangkat Daerah harus memilih dan memisahkan jabatan-jabatan yang menangani langsung masing-masing urusan, sehingga didapatkan secara pasti, berapa jumlah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang menangani masing-masing urusan. Untuk Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Struktural di bidang kesekretariatan dan bidang lain yang sulit

dipisahkan dimasukkan ke dalam urusan yang dominan. Data informasi tentang jabatan tersebut lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2017 (*updated*). Nama, jabatan, kepangkatan, pendidikan terakhir, pendidikan dan pelatihan struktural, dan lainnya sesuai dengan perumusan IKK-nya.

b. Contoh: Bagaimana menghitung struktur jabatan yang terisi.

Misalnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menangani 2 urusan.



Berdasarkan struktur organisasi di atas, dimisalkan urusan bidang perdagangan lebih dominan daripada urusan perindustrian, maka untuk pembagian pejabat struktural dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Perdagangan				Industri	
Kepala Perangkat Daerah					
Sekretaris					
Kasubag 1	Kasubag 2	Kasubag 3			
Kabid A		Kabid B		Kabid C	
Kasi A1	Kasi A2	Kasi B1	Kasi B2	Kasi C1	Kasi C2

Jumlah Pejabat yang menanggapi perdagangan, sebanyak 11 pejabat, dan industri sebanyak 3 Pejabat, sebagai berikut :

Pejabat	Perdagangan	Industri
Kepala Perangkat Daerah	1	-
Sekretaris	1	-
Kabid	2	1
Kasubag/Kasi	7	2
Jumlah	11	3

Contoh 10 : IKK nomor 7 : Pejabat yang memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan.

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
			Perindustrian	Perdagangan	Perindustrian	perdagangan	
(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim = 3 orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim = 11 orang 	100% $(3/3 \times 100 = 100\%)$	100% $(11/11 \times 100 = 100\%)$	
			Jumlah pejabat Perangkat Daerah yang ada = 3 orang	Jumlah pejabat Perangkat Daerah yang ada = 11 orang			

- c. Perangkat Daerah harus memilah dan memisahkan anggaran belanja dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakan, sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk masing-masing urusan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- d. Dalam hal inventarisasi barang dan aset, bilamana Perangkat Daerah tidak memilah dan memisahkan menurut urusan maka dilakukan dengan mencantumkan pada salah satu kolom isian urusan yang tersedia saja.

Contoh 11: IKK nomor 19: Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
			Perindustrian	perdagangan	Perindustrian	Perdagangan	
(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
19	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan = Rp. 0,-	Tidak ada pemisahan asset Perangkat Daerah	0% $(0/10 \text{ M} \times 100\% = 0)$	Tidak ada Pemisahan asset Perangkat Daerah	
			Total Asset yang dikuasai Perangkat Daerah = Rp. 10.M				

BAB 4

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN URUSAN PEMERINTAHAN (ASPEK CAPAIAN SPM)

IKK untuk Tataran Pelaksana Kebijakan Urusan Pemerintahan (aspek Capaian SPM), diberikan judul format IKK untuk provinsi (lampiran I.3), Kota (lampiran II.3) dan kabupaten (lampiran III.3) yaitu: “Tataran Pelaksana Kebijakan Urusan Pemerintahan (Aspek Tingkat Capaian Kinerja) Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan”.

Contoh. Lampiran III. 3: Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut:

LAMPIRAN III.3 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

KABUPATEN:

No	URUSAN	No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1.	Pendidikan	1				
		2				
		3				
		4				
2.	Dst					
26.						
URUSAN PILIHAN						
1.		1				
		2				
		3				
2.						
8.						

Format IKK terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Masing-masing urusan wajib dan pilihan terdiri dari beberapa IKK. IKK untuk masing-masing urusan diisi oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya.

4.1.PENJELASAN FORMAT

1. Format dibagi menurut urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan, dibagi dengan individu urusan.
3. Urusan wajib ada sebanyak 24 urusan dan masing-masing diikuti dengan IKK.
4. Urusan pilihan ada sebanyak 8 urusan dan masing-masing diikuti dengan IKK.
5. Bagi pemerintah daerah yang tidak menyelenggarakan satu atau beberapa dari urusan pilihan tertentu tulis BUP (Bukan Urusan Pilihan). Misalnya : Pemerintah Daerah tertentu tidak menyelenggarakan Urusan Transmigrasi, maka Urusan Transmigrasi ditulis BUP.
6. Kolom (1), (2), dan (3) adalah kolom tentang urusan dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi.
7. Kolom isian adalah kolom (5), (6), dan (7).
8. Kolom (5) Rumus/Perhitungan. Kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (6).
9. Kolom (6) Capaian Kinerja. Kolom ini di isi dengan capaian kinerja berdasarkan hasil perhitungan dari kolom (5); dan
10. Kolom (7) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan.

4.2.PETUNJUK UMUM

1. Perangkat Daerah, hanya mengisi IKK urusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan beberapa urusan, mengisi IKK-nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk satu urusan atau IKK yang diselenggarakan oleh beberapa Perangkat Daerah, melakukan koordinasi pengisian IKK-nya. Catatan: IKK telah disepakati dengan lintas sektor.
3. Setelah diisi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, hasil pengisian diserahkan kembali ke Bagian Pemerintahan atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyusun LPPD.
4. Setelah menerima isian, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyusun LPPD melakukan klarifikasi dan menyusun ke dalam LPPD.
5. Perangkat Daerah diminta untuk mendokumentasikan data informasi yang diserahkan, sebagai bukti dan akuntabilitas kinerja bilamana ada klarifikasi dan validasi kemudian.

4.3. PETUNJUK PENGISIAN

1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK yang menggunakan rumus persamaan, atau yang tidak menggunakan rumus persamaan.
2. IKK yang menggunakan rumus persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang menggunakan rumus persamaan.
3. IKK yang tidak menggunakan rumus persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK tidak menggunakan rumus persamaan.

4.4. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan di isi. Pastikan, data capaian kinerja yang diminta.
2. Tulis elemen-elemen data informasi IKK mengikuti rumus persamaan pada kolom "Rumus/Perhitungan". Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya.
3. Masukkan data angka hasil perhitungan pada kolom "Capaian Kinerja".
4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

Contoh 12: Pengisian IKK nomor 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No	URUSAN	No	IKK	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jml Siswa pd jg TK/RA/PA}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 tahun}} \times 100\%$	2% (50/2500 x 100% = 2%)	

4.5. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan, data informasi capaian kinerja yang diminta.
2. Tuliskan pernyataan hasil mengikuti rumus perhitungan pada kolom "Rumus/Perhitungan".
3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom "Capaian Kinerja".
4. Tuliskan informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

Contoh 13: Pengisian IKK nomor 17. Website

No	URUSAN	No	IKK	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Komunikasi dan Informasi	57	Website milik Pemerintah Daerah	Ada/Tidak Ada website milik pemerintah kabupaten....	Ada	

Contoh 14 : Pengisian IKK Urusan Pilihan yang tidak dilaksanakan “BUP

No	URUSAN	No	IKK	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Transmigrasi	15	Transmigrasi swakarsa	$\frac{\text{Jml trans. swakarsa}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100\% =$	BUP	

4.6.PETUNJUK KHUSUS:

1. Bagi IKK untuk provinsi yang capaian kinerja merupakan rata-rata dari capaian kinerja kabupaten dan kota di wilayahnya, diminta agar diantisipasi dengan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten dan kota.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan, batas waktu penyampaian LPPD provinsi, kabupaten dan kota paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dari aspek waktu penyampaian LPPD, tidak ada perbedaan antara provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itu, diminta agar data informasi capaian kinerja kabupaten dan kota dapat diinformasikan kepada pemerintah provinsi secepatnya, agar penyusunan LPPD provinsi, tidak mengalami keterlambatan.
3. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyerahkan LPPD Tahun 2017 secara lengkap kepada Gubernur, dan pemerintah provinsi yang menerima, menyerahkan tanda terima (resmi) kepada pemerintah kabupaten dan kota. Yang dimaksud dengan lengkap adalah LPPD dan lampiran (Isian IKK) dalam bentuk hard copy dan soft copy.
4. Pemerintah provinsi dihimbau agar segera mengirim “Softcopy-LPPD kabupaten dan kota yang lengkap” kepada Ditjen OTDA, Direktorat PKEKD melalui alamat email: ekpkd.otda@kemendagri.go.id.

TATA CARA PENYUSUNAN LPPD

INDIKATOR KINERJA KUNCI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI: -----

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak --- daerah Kab/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih. %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau PTSP
		Peraturan ttg kependudukan	2	Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan	Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	Kab/Kota yang memiliki perda kependudukan , sebanyak -----daerah. Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- daerah. %	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2017 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2017= ----- orang Jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 = -----orang	... per 50.000 penduduk	Sumber data dari BKD
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada Pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2017 disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2018.	Tepat / Tidak	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otda
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2017, disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2017 - Laporan Kinerja tahun 2017. disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2017	- Tepat/ tidak - Tepat/ tidak	Sumber data dari Bagian Keuangan

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
	Implementasi Standar Minimal Pelayanan (SPM)	6	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100% Rata-rata=urusan = Kab/kota	1) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 2) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 3) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 4) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 5) $\frac{\text{Dst ..}}{\text{Jumlah}} = \text{---- urusan}$ Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ---- Kab/Kot. urusan	1. SPM Pendidikan 2. SPM Kesehatan 3. SPM PU dan Tata Ruang 4. SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. SPM Trantibum dan Linmas 6. SPM Sosial
	Hubungan antar daerah	7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2017)	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak ---- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ---- tentang kerjasama ----. 2) MOU dengan ---- tentang kerjasama ----. 3) Dst--- MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi <u>Jumlah prioritas pembangunan nasional</u> ¹	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak ---- program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak ---- program %	Sumber data dari BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
	Kewenangan	9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2017) X 100%	Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100% Rata-rata=urusan = Kab/kota	1) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 2) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 3) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 4) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 5) $\frac{\text{Dst ..}}{\text{Jumlah}} = \text{---- urusan}$ Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ---- Kab/Kot. %	

¹ Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata PP Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Keuangan	10	Waktu penetapan perda APBD 2017	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD 2017 (31 Desember 2016)	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -- ----APBD 2017	Tepat/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD. Tidak tepat , apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2016.
			11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -- ----- (pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			12	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) PU dan Tata Ruang Rp. ----- 4) Perumahan & Kawasan Pemukiman Rp. ----- 5) Trantibum dan Linmas Rp. ----- 6) Sosial Rp. ----- Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----- Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
			13	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan/ pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2017. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) <u>Urusan Kesehatan</u> Rp. ----- Total Belanja Pend & Kes Rp. ----- Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Data Diambil dari : - Dinas Pendidikan - Perangkat Daerah lain yang melaksanakan urusan Pendidikan
		Pelayanan Publik	14	Keberadaan Perda	Ada atau tidak ada standar	Apabila ADA:	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
				tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ² sesuai dengan peraturan perundang-undangan	pelayanan public	Sebutkan dasar hukum, Perda Nomor ----- Tahun----- tentang ----- (standar pelayanan publik')		Hukum
		Kepegawaian	15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Provinsi tahun 2017 sebanyak ----- orang. Jumlah penduduk provinsi tahun 2017 sebanyak ----- orang. -	-----	Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
		Kepegawaian	16	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak ada database kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD
		Kelembagaan	17	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb: 1) Biro (Setda) = ----- unit 2) Dinas = ----- unit 3) Badan = ----- unit 4) Kantor = ----- unit 5) Rumah Sakit = ----- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ----- unit Jumlah Perangkat Daerah = ----- unit	----- unit	Sumber data dari Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	18	Perda yang ditetapkan	Jumlah perda yang ditetapkan dalam tahun 2017	Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2017, sebanyak ----- Perda (Daftar Perda terlampir) Perda	Sumber data dari Bagian Hukum

² Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	19	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi Jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017, sebanyak ----- PERDA. - RAPERDA yang diusulkan tahun 2017, sebanyak -----RAPERDA. 	... %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang DPRD ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2017 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2017, sebanyak-----keputusan. %	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub)	21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah KepGub dalam tahun 2017 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak ----- keputusan. %	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjut Peraturan Gubernur (PerGub)	22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah PerGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah PerGub dalam tahun 2017 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Pergub. - Peraturan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak ----- Pergub. %	Sumber data dari Bagian Hukum
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	23	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%	<p>Perda yang dibatalkan, sebanyak ----- , yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang ----- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang ----- 3) Dst. <p>Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- Perda.</p> %	Sumber data dari Bagian hukum

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA atau PerGub tentang konsultasi publik	24	Keberadaan PERDA atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada PERDA Atau PerGub	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Pergub Nomor Tahun ---- -- tentang ----- (konsultasi publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik	25	Adanya media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/ biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi. yang ditetapkan dengan PerGub	Apabila Ada, - Sebutkan nama media informasinya -- ----dan. - Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017 sebesar Rp. ----- - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja APBD dari DAU pada	27	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi DAU X 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- - DAU Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja APBD pada	28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100%	Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- Total Belanja APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100%	- PAD APBD Tahun 2017, sebesar Rp --- -- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017 (Realisasi), sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: ----- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: -----	Opini tahun 2016 = ----- Opini tahun 2017= -----	Opini,; WTP/ <i>unqualified opinion</i>); WDP/ <i>qualified opinion</i>); TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>).
		Besaran SILPA	31	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100%	- SILPA Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Realisasi Pendapatan	32	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Realisasi belanja	33	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Pembilang : Sumber data dari Laporan Realisasi Belanja/LRA Penyebut : Sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Provinsi	34	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2017, sebanyak.....temuan %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	35	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap <u>potensi PAD</u> ³	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2017 , sebesar Rp----- %	Sumber data dari BPKAD
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100%	- Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		(PAD)			Atau (PAD 2017- PAD 2016) : PAD 2016 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp.-----		RPJMD)
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	37	Penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.	Jumlah penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016	Penghargaan yang diterima, sebanyak ---- - yang terdiri dari 1) -----. 2) -----. 3) -----. 4) Dst -----. Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada E- procurement	Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP. Data berupa proses e- procurement
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2017	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2017, sebanyak ----- ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp -----	... ijin	Sumber data dari Kantor PTSP (PMDN Nilainya >=500 jt)

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI :

NAMA PERANGKAT DAERAH :

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah ybs)

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Ada -----SOP / Tidak Ada :	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak ----- - PERDA yang seharusnya, sebanyak ----- %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak --- - Jabatan yang harus ada, sebanyak -----%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak ----- personil - Total PNS Provinsi, sebanyak -- ----- personil	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/BKD.
	7		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak ---- -----org. %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
	8		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. - Jabatan yang ada, sebanyak --- ----- jbt. %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. 2. 3. jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ---- ---- program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ----- %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak --- program. %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak --- program. %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, ---- - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, ---- %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (Total anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ---- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Tidak Ada/ Ada sebanyak ---- --- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp -----. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	Jumlah sebanyak ----- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM
RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

Provinsi:

NAMA PERANGKAT DAERAH:

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan -----

2. Urusan ----- (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah ybs)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOK US	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program % %	Lihat Program Nasional untuk masing- masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak --- -- yang terdiri dari: 5. SOP ttg ----- 6. SOP ttg ----- 7. SOP ttg ----- 8. Dst -----	Ada ----- --SOP / Tidak Ada:	Ada ----- --SOP / Tidak Ada:	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak-----	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak - % %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak ----- - Jabatan yang	- Jabatan yang terisi sebanyak -- --- - Jabatan yang % %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOK US	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jeni		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7	(8A)	(8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --- -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- -----.	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah`. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017.
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah, sebanyak ----- personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak -----	PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah, sebanyak ----- personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang	Pejabat yang telah diklatpim sesuai penjurangan, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -- % %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak ----- org. - Jabatan yang	Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak -- -- org. - Jabatan yang ada, sebanyak -- % %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. 2. 3.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. 2. 3. jenis dokumen jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jeni		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ---	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak -- ---- program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -- % %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak - ---- program. % %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. % %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, -- --- - Total Belanja APBD, sebesar Rp -----	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, ----- - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp ----- % %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerahx 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- % %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah	- Total Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah. % %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jeni		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7	(8A)	(8B)	(9)
				dan jasa	Perangkat Daerah) x 100%	sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa Perangkat	sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----			
			16	Total Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	Total Realisasi belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total realisasi belanja Perangkat Daerah.	- total realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- % %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. 2. 3.	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. 2. 3.	Tidak Ada/ Ada sebanyak -- ---- jenis :	Tidak Ada/ Ada sebanyak -- ---- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai PD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp.	- Asset yang tidak digunakan, Rp. -----. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp. % %	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas, prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jeni		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7	(8A)	(8B)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017.

PROVINSI -----

No	URUSAN	No	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI X 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI %	Suber data Dinas Pendidikan/Sosial
		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS X 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS %	Suber data Dinas Pendidikan/Sosial
		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA X 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA %	Suber data Dinas Pendidikan/Sosial

		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	<p>Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/Paket C</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah Penduduk kelompok usia 16 -18 tahun</p>	-----%	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Dukcapil
		5	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<p>Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<p>Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajara sebelumnya</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	<p>Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		8	Pembinaan Guru jenjang SD/MI	<p>Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah Guru jenjang SD/MI</p>%	Sumber data dari Dinas Pendidikan

		9	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS	Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----- x 100 % Jumlah Guru jenjang SMP/MTS%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		10	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----- x 100 % Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		11	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peta penjaminan mutu Pendidikan	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		15	Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapatkan perawatan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		18	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		19	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
3	Lingkungan Hidup	20	Pencemaran Udara	Jumlah Kabupaten dan Kota yg dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari Dinas LH
		21	Kebersihan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		22	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		23	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

4	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24	Jalan provinsi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan orovinsi}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
		25	Rumah tangga persanitasi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		26	Kawasan kumuh	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		27	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
5	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		29	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
6	Kepemudaan & Olahraga	30	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		31	Lapangan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

7	Penanaman Modal	32	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2017 – Realisasi PMDN thn 2016 ----- X 100 % Realisasi PMDN 2016%	Sumber data dari Dinas Penanaman Modal
8	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		34	Usaha Makro dan Kecil	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
9	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	35	Ketersediaan data base kependudukan skala Provinsi	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dukcapil/ Perangkat Daerah yg menangani
10	Tenaga Kerja	36	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/buruh	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		37	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
11	Pangan	38	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dinas Pangan / Perangkat Daerah yg menangani
		39	Ketersediaan pangan utama	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

12	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	40	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan ----- 100 % Jumlah pekerja perempuan%	Sumber data dari Dinas PP & PA/ Perangkat Daerah yg menangani
		41	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
13	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	42	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		43	Rasio petugas lapangan KB /penyuluh KB (PLKB) disetiap Desa/Kalurahan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
14	Perhubungan	44	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
15	Komunikasi & Informatika	45	Web site milik pemda	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dinas Kominfo / Perangkat Daerah yg menangani
		46	Pameran/ Expo	Menunjukkan jumlah pameran/Expo yang dilaksanakan per tahun	Sumber data dari Dinas Kominfo
16	Pertanahan	47	Luas lahan bersertifikat	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48	PKK aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
18	Sosial	49	Sarana social seperti panti asuhan, panti jompo & panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana social seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi dll yang terdapat di suatu daerah	-----	Sumber data dari Dinas Sosial/ Perangkat Daerah yg menangani
		50	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ----- X 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
19	Kebudayaan	51	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	-----	Sumber data dari Dinas Budpar/ Perangkat Daerah yg menangani
		52	Sarana penyelenggaraan seni & budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-----	Sumber data dari Dinas Budpar/ Perangkat Daerah yg menangani
20	Statistik	53	Buku "Provinsi dalam angka"	Ada/Tidak	Ada/Tidak *)	Sumber data dari Perencanaan Pembangunan/ Perangkat Daerah yg menangani
		54	Buku "PDRB provinsi"	Ada/Tidak	Ada/Tidak *)	Sumber data dari Perencanaan Pembangunan/ Perangkat Daerah

						yg menangani
21	Kearsipan	55	Pengelolaan Arsip secara baku	<p>Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku ----- X 100 %</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah</p>%	Sumber data dari Dinas Arsip/ Perangkat Daerah yg menangani
		56	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelolaan Arsip		Sumber data dari Dinas Kearsipan/ Perangkat Daerah yg menangani
22	Perpustakaan	57	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	<p>Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ----- X 100 %</p> <p>Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah</p>%	Sumber data dari Dinas Perpustakaan/ Perangkat Daerah yg menangani
		58	Pengunjung Perpustakaan	<p>Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun ----- X 100 %</p> <p>Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani</p>%	Sumber data dari Perpustakaan/ Perangkat Daerah yg menangani

URUSAN PILIHAN						
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi Perikanan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		2	Exspor hasil perikanan	Nilai export hasil perikanan (ton pertahun) ----- X 100 % Target daerah%	Sumber data dari Dinas Kelautan & Perikanan
		3	Konsumsi ikan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
2	Pertanian	4	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2017	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian ----- X 100 % Jumlah total PDRB%	Sumber data dari Buku PDRB sektor pertanian (harga berlaku)

3	Kehutanan	6	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi ----- X 100 % Luas total hutan dan lahan kritis%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
		7	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kerusakan kawasan hutan ----- X 100 % Luas kawasan hutan%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
4	Energi dan SDM	8	Pertambangan tanpa ijin	Luas penambangan liar yang ditertibkan ----- X 100 % Luas area penambangan liar%	Sumber data dari Dinas ESDM
		9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2017	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan ----- X 100 % Jumlah total PDRB%	Sumber data dari Buku PDRB sektor pertambangan
5	Pariwisata	10	Kunjungan wisata	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2017	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- X 100 % Jumlah total PDRB%	Sumber data dari buku PDRB, sektor jasa, hotel, restoran, (harga berlaku)
6	Perindustrian	12	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2017	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri		Sumber data dari buku PDRB,

				----- X 100 % Jumlah total PDRB%	sektor industri, (harga berlaku)
		13	Pertumbuhan industri secara keseluruhan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
7	Perdagangan	14	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ----- X 100 % Jumlah total PDRB%	Sumber data dari buku PDRB, sektor perdagangan, (harga berlaku)
		15	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih bersih= nilai ekspor – nilai impor	U\$\$.....	Sumber data dari Dinas Perdagangan
8	Transmigrasi	16	Transmigrasi swakarsa	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ----- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota%	Normalisasi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Sumber data dari Dinas Kominfo/ Perangkat Daerah yg menangani
		2	Tapalbatas	Jumlah permasalahan perbatasan antar Kabupaten/ Kota yg diselesaikan ----- X 100 % Jumlah permasalahan perbatasan antar Kabupaten dan Kota yg dilaporkan%	Sumber data dari Biro Pemerintahan / Perangkat Daerah

						yg menangani
		3	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA
		6	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	$\frac{\text{Penjabaran program RPJMD dalam RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \%$%	Sumber data Bappeda
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat Daerah yg menangani
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Sumber data Dinas dari Kesbangpol/ Perangkat Daerah yg menangani

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA : -----

(1)	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ----- Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah ¹ seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2017, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2017, seba %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : --- ---Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP %	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Rp./ Tidak dipungut	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparatur Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2017 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2017, sebanyak = ----- orang - Penduduk pada akhir tahun 2017, berjumlah = ----- orang	... per 10.000 penduduk	Sumber data dari BKD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Ada/tidak ada	Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kota	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---- --Tahun ----- tentang -----	Ada/ tidak ada	Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2017 disampaikan pada tanggal --- ---- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2018.	Tepat / tidak	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja		10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2017, disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ----- 2018 - Laporan Kinerja tahun 2017. disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2018	Tepat/tidak	Sumber data dari Bagian Keuangan	
		11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian laporan kinerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja tahun 2017. disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor-----tanggal ----- 2018	Tepat/tidak	Normalisasi	
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak ----- urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan PU dan Penataan Ruang 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5) Urusan Trantibum dan Linmas 6) Urusan Sosial Urusan	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2017, sebanyak 6 urusan.	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian KInerja	Keterangan
		Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2017	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 3) Dst--- MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> ²	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ----- prioritas. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 9 program/agenda prioritas. %	Sumber data dari BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Kewenangan	15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2017 (APBD) = ----- urusan. %	Sumber data : sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016.
		Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2017	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2017	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD 2017. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2016).	Tepat/ tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) Urusan PU dan Penataan Ruang Rp. ----- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan- %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi			

² Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
						Permukiman Rp..... 5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. ----- 6) Urusan Sosial Rp..... Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----- Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. -----		menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
			19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2017. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) <u>Urusan Kesehatan Rp. -----</u> Total Belanja Pend & Kes Rp. ----- %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data diambil dari : - Dinas Pendidikan -Perangkat Daerah lain yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pelayanan Publik	20	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ³ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ----- Tahun ----- tentang ----- (standar pelayanan publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum
		Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Kota tahun 2017 sebanyak ----- orang. Jumlah penduduk Kota tahun 2017 sebanyak -- ----- orang.	-----	Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
			22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD

³ Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian KInerja	Keterangan
		Kelembagaan	23	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb: 1) Bagian (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ---- unit 7) Kecamatan/Distrik = ---- unit Jumlah Perangkat Daerah = ---- unit	----- unit	Sumber data dari Bagian Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2017, sebanyak ----- Perda (Daftar terlampir)	... PERDA	Sumber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2017	- RAPERDA yang disetujui tahun 2017, sebanyak ----- RAPERDA. - RAPERDA yang di usulkan DPRD tahun 2017, sebanyak ----- PERDA.	... %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2017 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2017, sebanyak----- keputusan.	... %	Sumber data dari Setwan
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjuti keputusan Walikota	27	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan walikota dalam tahun 2017 x 100%	- Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti tahun 2017, sebanyak----- keputusan. - Keputusan walikota tahun 2017 yang di usulkan, sebanyak ----- keputusan. %	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjuti Peraturan Walikota	28	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak- lanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2017 x 100%	- Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Per-Walikota. - Peraturan Walikota dalam tahun 2017 sebanyak ----- Per-Walikota. %	Sumber data dari Bagian Hukum

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian KInerja	Keterangan
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak ----- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang - ---- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang - ---- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- %	Sumber data dari Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, - Sebutkan dasar hukumnya: PERDA atau Perbup Nomor Tahun ---- tentang ---- (konsultasi publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kota, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerWali	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Mediana :----- - Sebutkan Perbup nomor ----- tahun ----- tentang -----.	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017 sebesar Rp. ----- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. - %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Realisasi Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- - DAU Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dar Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD	34	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total realisasi belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total realisasi Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- - Total realisasi Belanja APBD Tahun 2017, Sebesar Rp..... %	Sumber data berasal dar Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: ----- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: -----	Opini tahun 2016 = ----- Opini tahun 2017= -----	Opini: 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i>); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i>); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>). Opini LHP Tahun 2017, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp -- ----- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Kota	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2017, sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak ----- temuan. %	Sumber data dari Inspektorat Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti.
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap <u>potensi PAD</u> ⁴	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2017 APBD %	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)

⁴ Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian KInerja	Keterangan
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2017 - PAD 2016) : PAD 2016 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. ---- - Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp.---- %	Sumber data dari BPKAD
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017	Penghargaan yang diterima, sebanyak ----- yang terdiri dari 1) -----, 2) -----, 3) -----, 4) Dst -----. Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP. Data berupa proses E-procurement
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2017	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2017, sebanyak ----- ijin	... ijin	Sumber data dari Kantor PTSP (PMDN >=200 Juta

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA :

NAMA PERANGKAT DAERAH : (Sebutkan nama Perangkat Daerah)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah ybs)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program %	Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Ada -----SOP / Tidak Ada :	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis yaitu petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak ----- %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada	- Jabatan yang ada sebanyak --- -- - Jabatan yang harus ada, sebanyak -----%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPND terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS Kota	- PNS Perangkat daerah, sebanyak ___ personel - Total PNS Kota sebanyak ____ personel %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat DiklatpimOrg - Pejabat yang ada sebanyak Org %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan Org - Pejabat yang ada sebanyak Org %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak jenis, yang terdiri dari : 1. 2. 3.	Jenis dokumen	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	9	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak program %	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar Rp ----- %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Tidak Ada/ Ada sebanyak ---- --- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah,Sebesar Rp. -----. %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	Jumlah sebanyak ----- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KOTA :

NAMA PERANGKAT DAERAH :

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan -----
2. Urusan ----- (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah ybs)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FO KU	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program % %	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 5. SOP ttg ----- 6. SOP ttg ----- 7. SOP ttg ----- 8. Dst -----	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis yaitu petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak - ---- % %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian struktur	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah	- Jabatan yang terisi sebanyak -----	- Jabatan yang terisi sebanyak -----			Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	DAERAH			terisi	jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada, sebanyak ----	- Jabatan yang ada, sebanyak ----- % %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- -----.	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah, sebanyak ----- personil - Total PNS Kota, sebanyak ---- personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah, sebanyak ----- personil - Total PNS Kota, sebanyak ---- personil	-----	-----	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Rasio pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan sebanyak----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak org.	- Pejabat yang mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak - ---- org. - Pejabat yang ada, sebanyak ----- org. % %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---org - Jabatan yang ada, sebanyak --- -- jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --- -- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt. % %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ---- - jenis, yg terdiri dari: 1. 2. 3.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari: 1. 2. 3. jenis dokumen jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/Perangkat Daerah yang bersangkutan
---	---	---	---	--	---	--	--	---------------------	---------------------	--

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) ----- --	Urusan (2) ----- --	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- -- program. - Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan , sebanyak -----	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- -- program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan sebanyak -- % %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- -- program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- -- program.	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- -- program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- -- program. % %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak -- -- program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ---- -- program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak -- -- program. - Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak ----- -- program. % %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Total Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah dibagi total Anggaran APBD x 100%	- Total Anggaran belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, ---- -- - Total Belanja APBD, sebesar Rp --- --	- Total Anggaran belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, --- -- - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp ---- % %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- -- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.-----	- Realisas Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- -- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.----- % %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total Realisasi belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x	- Tota Realisasil belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- % %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						- Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah,	- Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. --			
			16	Total Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	Total realisasi belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah X 100%	- total realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. -	- total realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- % %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. 2. 3.	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. 2. 3.	Tidak Ada/ Ada sebanyak -- ---- jenis :	Tidak Ada/ Ada sebanyak -- ---- jenis :	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/ asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/ asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp ----- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp -----.	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ----- asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak ----- asset. % %	Sumber data dari BPKAD
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4.	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data lampirkan foto)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						5.	5.			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- -	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KOTA: -----

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4-6 tahun}} \times 100 \%$%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15th ke atas}} \times 100 \%$%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100 \%$%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100 \%$%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kesehatan	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	<p>Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 %</p> <p>Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	<p>Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	<p><u>Jumlah Desa / Kelurahan UCI</u> x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	<p>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu ----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	<p>Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn ----- x 100 %</p> <p>Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	<p>Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn ----- x 100%</p> <p>Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		17	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	<p>Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh maskin di Kota</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		18	Cakupan kunjungan bayi	<p>Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Lingkungan Hidup	19	Penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan
		20	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik}}{\text{Jumlah seluruh pasar tradisional}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan. Tergolong baik sesuai kriteria Adipura
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Pembilang berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah/Dinas Kebersihan dan Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		22	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan)
		24	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100 \%$%	Normalisasi
		25	Rumah Tangga Per-sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$%	Pembilang (jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kota) sumber data berasal dari Dinas Pekerjaan Umum

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		26	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) tdk termasuk hutan lindung
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$%	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal di rumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		29	Lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
		30	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni%	Sumber data dari Dinas PU

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				----- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.		
6	Kepemudaan & Olahraga	31	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota ----- x 1000 Jumlah penduduk	Pembilang Sumber data dari Dispora Penyebut sumber data dari Dukcapil
		32	Lapangan olahraga .	Jumlah lapangan olahraga di Kota ----- x 1000 Jumlah penduduk Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = ---- lap 2. lap basket, = ---- lap 3. lap volley, , = ---- lap 4. lap. bulu tangkis, = ---- lap 5. <u>kolam renang.</u> , = ---- lap Jumlah = ---- lap	Jumlah sarana Olah Raga yg dikelola pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri
7	Penanaman Modal	33	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2016 – Realisasi PMDN 2015 ----- x 100 % Realisasi PMDN 2016%	Sumber data dari Dinas/ Badan Penanaman Modal daerah (BPMD)
8	Koperasi & UKM	34	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi%	Sumber data Dinas Koperasi
		35	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil ----- x 100 % Jumlah seluruh UKM%	Sumber data dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan melampirkan rekap SIUP kecil
9	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	36	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP ----- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)%	Sumber data Dinas Duk Capil

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		37	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah_penduduk}} \times 1000$	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		38	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah/ Belum *)	Sumber data dari Dinas Dukcapil
10	Ketenagakerjaan	39	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan
		40	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja (melampirkan rekap Surat Pengantar Rekrut)
11	Pangan	41	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura atau Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan
		42	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Sumber data pembilang dari Dinas Ketahanan Pangan Jenis pangan utama : padi, jagung, Sagu, Umbi), sedangkan sumber data penyebut dari Dinas/Bagian Dukcapil
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$%	Melampirkan rekap data pekerja perempuan
		44	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\text{Jumlah_anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas PPA/Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas PPA/Dukcapil
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46	Prevalensi peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100 \%$%	Sumber data dari BKKBN
		47	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan PLKB/PKB}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari BKKBN/ Dinas Sosial/ Dinas PPPA/ KBKS
14	Perhubungan	48	Angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}}$	Sumber data Dians Perhubungan
15	Komunikasi & Informatika	49	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	Ada/tidak *)	Sumber Data dari Biro Humas/ Dinas Kominfo
		50	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahunkali	Sumber Data dari (Penyelenggara Kegiatan) Biro Humas/ Dinas Kominfo
16	Pertanahan	51	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100 \%$%	Sumber Data dari Dinas Pertanahan (dengan melampirkan rekap Sertifikat)
		52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Pertanahan dengan melampirkan rekap surat permasalahan
		53	Penyelesaian Ijin Lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Pertanahan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	54	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		55	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Sosial	56	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, dll yang terdapat di suatu daerahbuah	Sumber data dari Dinas Sosial
		57	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Sosial
		58	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Sosial

Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Kebudayaan	59	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	-----Kali	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		60	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	----- Buah	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		61	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs \& kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
20	Statistik	62	Buku "Kota dalam angka"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
		63	Buku "PDRB Kota"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
21	Kearsipan	64	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \%$%	<ul style="list-style-type: none"> Sumber data pembilang dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip Sumber data penyebut dari Bagian Organisasi
		65	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan	Sumber data dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip
22	Perpustakaan	66	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}$	Sumber data dari Kantor perpustakaan daerah

		67	Pengunjung perpustakaan	<p>Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun</p> <p>-----</p> <p>Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10–58 thn)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data pembilang dari Kantor perpustakaan daerah • Sumber data penyebut dari Dukcapil
--	--	-----------	-------------------------	--	-------	---

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN PILIHAN					
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton/tahun)}}{\text{Target Daerah (Ton/tahun)}} \times 100\%$	----- %	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$	-----%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}}$	Sumber data dari Dinas Pertanian
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)
3	Pariwisata	5	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahunorang	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata atau buku PDRB sub sector Perdagangan (jasa, hotel, restoran) dg menggunakan harga
4	Perindustrian	7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Perindustrian atau buku PDRB sector Industri Pengolahan (harga berlaku)

		8	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2016} - \text{Jumlah Industri tahun 2015}}{\text{Jumlah Industri s/d tahun 2016}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Perindustrian
5	Perdagangan	9	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Perdagangan atau buku PDRB sub sector Perdagangan (harga berlaku)
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	US\$	Sumber data dari Dinas Perdagangan
6	Transmigrasi	11	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100\%$%	Sumber data dari dinas Transmigrasi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKP	$\frac{\text{Jumlah program RKP tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$%	Sumber data pembilang dan Penyebut dari BAPPEDA
		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybsbuah	Sumber data dari Dinas Kominfo
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada/tidak*)	Sumber data dari Kantor PTSP / BP2TPM
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						

		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik di daerahKeg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKPKeg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

LAMPIRAN: III.1 FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN: -----

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ----- Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah ¹ seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2017, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2017, sebanyak ----- Unit. %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : --- ---Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP Hr	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Rp./ Tidak dipungut	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparatur Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2017 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2017, sebanyak = ----- orang - Penduduk pada akhir tahun 2017, berjumlah = ----- orang	... per 10.000 penduduk	Sumber data dari BKD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Ada/tidak ada	Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---- --Tahun ----- tentang -----	Ada/ tidak ada	Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2017,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2017 disampaikan pada tanggal --- ---- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2018.	Tepat / tidak	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja		10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2017, disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ----- 2018	Tepat/tidak	Sumber data dari Bagian Keuangan	
		11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian Laporan Kinerja sesuai jadwal yg telah ditetapkan oleh peraturan	Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja tahun 2017 disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor-----tanggal ----- 2018	Tepat/tidak	Normalisasi	
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak ----- urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan PU dan Penataan Ruang 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5) Urusan Trantibum dan Linmas 6) Urusan Sosial Urusan	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2017, sebanyak 6 urusan.	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian KInerja	Keterangan
		Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2016	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 3) Dst--- MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> ²	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ----- prioritas. - Prioritas pembangunan nasional ada - sebanyak 9 rogram/agenda prioritas. %	Sumber data dari BAPPEDA/Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Kewenangan	15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2017 (APBD) = ----- urusan. %	Sumber data : sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2017.
		Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2017	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2016	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD 2017. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2016).	Tepat/ tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) Urusan PU dan Penataan Ruang Rp.----- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan- %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi belanja per-			

² Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
						Permukiman RP..... 5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. ----- 6) Urusan Sosial Rp..... Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----- Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. -----		evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
			19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) <u>Urusan Kesehatan Rp. -----</u> Total Belanja Pend & Kes Rp. ----- %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data diambil dari : - Dinas Pendidikan - Perangkat Daerah lain yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pelayanan Publik	20	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ³ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ----- Tahun ----- tentang ----- (standar pelayanan publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum
		Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS kabupaten tahun 2017 sebanyak -- ----- orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2017 sebanyak ----- orang-	-----	Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
			22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD

³ Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian KInerja	Keterangan
		Kelembagaan	23	Penataan PerangkatDaerah	Jumlah pembentukan PerangkatDaerah berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah PerangkatDaerah, sbb:: 1) Bagian (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ---- unit 7) Kecamatan/Distrik = ---- unit Jumlah PerangkatDaerah = ---- unit	----- unit	Sumber data dari Bagian Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2017, sebanyak ----- Perda (Daftar terlampir)	... PERDA	Sumber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2017	- RAPERDA yang disetujui tahun 2017, sebanyak ----- RAPERDA. - RAPERDA yang diusulkan DPRD tahun 2017 sebanyak ----- PERDA.	... %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2017 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2017, sebanyak----- keputusan.	... %	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjuti keputusan Bupati	27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2017 x 100%	- Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2017, sebanyak -- ---- keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2017 , sebanyak -- ---- keputusan. %	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjuti Peraturan Bupati	28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Kabupaten dalam tahun 2017 x 100%	- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Perbup. - Peraturan Bupati dalam tahun 2017, sebanyak ----- Perbup. %	Sumber data dari Bagian Hukum

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian KInerja	Keterangan
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak ----- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang - ---- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang - ---- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- %	Sumber data dari Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Mediana :----- - Sebutkan Perbup nomor ----- tahun ----- tentang -----.	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017 sebesar Rp. ----- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. - ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- - DAU Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dar Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD	34	<u>Belanja Langsung</u> terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- - Total Belanja APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dar Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: ----- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: -----	Opini tahun 2016 = ----- Opini tahun 2017= -----	Opini: 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i>); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i>); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>). Opini LHP Tahun 2016, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp -- ----- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2017, sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak ----- temuan. %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti.
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap <u>potensi PAD</u> ⁴	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2017 APBD %	Sumber data dari BPKAD , angka pembagi menggunakan potensi PAD dalam target tahunan dalam RPJMD

⁴ Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian KInerja	Keterangan
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2017 - PAD 2016) : PAD 2016 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. ---- - Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp. ---- %	Sumber data dari BPKAD
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016	Penghargaan yang diterima, sebanyak ---- yang terdiri dari 1) -----. 2) -----. 3) -----. 4) Dst -----. Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP. Data berupa proses E-procurement
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2017	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2017, sebanyak ----- ijin	... ijin	Sumber data dari Kantor PTSP (nilai masing-masing ijin investasi >= 200 juta)- (PMDN)

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN :

NAMA PERANGKAT DAERAH :

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh PerangkatDaerah)

Diisi oleh PerangkatDaerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan PerangkatDaerah, sebanyak -- %	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Ada -----SOP / Tidak Ada :	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak ----- %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak --- -- - Jabatan yang harus ada, sebanyak -----%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PerangkatDaerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PerangkatDaerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ PerangkatDaerah. Mengacu kondisi PerangkatDaerah terakhir/updated Tahun 2017.

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPND terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah, sebanyak ----- personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjurangan, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -- -- org. %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. - Jabatan yang ada, sebanyak --- -- jbt. %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. 2. 3. jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
			10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ----- %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPd tahun 2016 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
			11	Jumlah Program RENJA RKPd yang	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir	- Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA		Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perangkat Daerah		dalam RKA Perangkat Daerah	dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. %	dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar Rp----- %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.----- %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Tidak Ada/ Ada sebanyak ----- --- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- . - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----. %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	Jumlah sebanyak ----- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN :
NAMA PERANGKAT DAERAH :
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

- 1. Urusan -----
- 2. Urusan ----- (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah ybs)

No	ASPEK	FOK US	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program % %	Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 5. SOP ttg ----- 6. SOP ttg ----- 7. SOP ttg ----- 8. Dst -----	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak - % %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian struktur	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah	- Jabatan yang terisi sebanyak -----	- Jabatan yang terisi sebanyak -----			Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	DAERAH			terisi	jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada, sebanyak -----	- Jabatan yang ada, sebanyak ----- % %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --- -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- -----.	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017.
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak ----- personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah, sebanyak ----- personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	-----	-----	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org. % %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- - org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --- -- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt. % %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. 2. 3.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. 2. 3. jenis dokumen jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA PD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlahb Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- -- program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ---	- Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ---- ---- program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak - ----- % %	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak --- -- program.	- Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak - ---- program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak --- -- program. % %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak -- --- program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak -- --- program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. % %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017..
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar -----	- Total belanja belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, % %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2017.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- - Total Belanja Perangkat Daerah,	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.-- --- % %	Mengacu LKD tahun 2017.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	- - Total belanja pemeliharaan	- - Total belanja pemeliharaan % %	Mengacu LKD tahun 2017.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				dan jasa (realisasi)	Perangkat Daerah) x 100%	sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah X 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. - ----- % %	Mengacu APBD tahun 2017.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. 2. 3.	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. 2. 3.	Tidak Ada/ Ada sebanyak -- ----- jenis :	Tidak Ada/ Ada sebanyak -- ----- jenis :	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp ----- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp -----.	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp---- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. --- % %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- -	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KABUPATEN:-----

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak ----- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kesehatan	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		17	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1}}{\text{Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		18	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Lingkungan Hidup	19	Penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{produksi sampah (m3)}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan
		20	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik}}{\text{Jumlah seluruh pasar tradisional}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan. Tergolong baik sesuai kriteria Adipura
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Pembilang berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah/Dinas Kebersihan dan Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		22	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan)
		24	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		25	Rumah Tangga Per-sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$%	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal di rumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) sumber data berasal dari Dinas Pekerjaan Umum

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		26	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$%	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah
		29	Lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
		30	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas PU

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Kepemudaan & Olahraga	31	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Pembilang Sumber data dari Dispora Penyebut sumber data dari Dukcapil
		32	Lapangan olahraga .	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$ <p>Lapangan olah raga adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lap sepakbola, = ----- lap 2. lap basket, = ----- lap 3. lap volley, , = ----- lap 4. lap. bulu tangkis, = ----- lap 5. <u>kolam renang.</u>, = ----- lap <p>Jumlah = ----- lap</p>	Jumlah sarana Olah Raga yg dikelola pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri
7	Penanaman Modal	33	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2017} - \text{Realisasi PMDN 2016}}{\text{Realisasi PMDN 2016}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas/ Badan Penanaman Modal daerah (BPMD)
8	Koperasi & UKM	34	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$%	Sumber data Dinas Koperasi
		35	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan melampirkan rekap SIUP kecil
9	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	36	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)}} \times 100 \%$%	Sumber data Dinas Duk Capil

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		37	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		38	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah/ Belum *)	Sumber data dari Dinas Dukcapil
10	Tenaga Kerja	39	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan
		40	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja (melampirkan rekap Surat Pengantar Rekrut)
11	Pangan	41	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura atau Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan
		42	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Sumber data pembilang dari Dinas Ketahanan Pangan Jenis pangan utama : padi, jagung, Sagu, Umbi), sedangkan sumber data penyebut dari Dinas/Bagian Dukcapil
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\% \text{ Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$%	Melampirkan rekap data pekerja perempuan
		44	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\% \text{ Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100$%	Sumber data dari Dinas PPA/Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas PPA/Dukcapil
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46	Prevalensi peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100 \%$%	Sumber data dari BKKBN
		47	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan PLKB/PKB}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari BKKBN/ Dinas Sosial/ Dinas PPPA/ KBKS
14	Perhubungan	48	Angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}}$	Sumber data dari dinas perhubungan
15	Komunikasi & Informatika	49	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	Ada/tidak *)	Sumber Data dari Biro Humas/ Dinas Kominfo
		50	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahunkali	Sumber(Penyelenggara Kegiatan) Biro Humas/ Dinas Kominfo
16	Pertanahan	51	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100 \%$%	Sumber Data dari Dinas Pertanahan (dengan melampirkan rekap Sertifikat)
		52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100 \%$%	Sumber : Dinas Pertanahan (rekap surat permasalahan)
		53	Penyelesaian Ijin Lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Pertanahan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	54	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\% \text{ Jumlah PKK}} \times 100$%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		55	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\% \text{ Total Posyandu}} \times 100$%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Sosial	56	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi yang terdapat di suatu daerahbuah	Sumber data dari Dinas Sosial
		57	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun}}{\%} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Sosial
		58	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Sosial
19	Kebudayaan	59	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya kali	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		60	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya buah	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		61	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Statistik	62	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
		63	Buku "PDRB kabupaten"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
21	Kearsipan	64	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \%$%	<input checked="" type="checkbox"/> Sumber data pembilang dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip <input checked="" type="checkbox"/> Sumber data penyebut dari Bagian Organisasi
		65	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan	Sumber data dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip
22	Perpustakaan	66	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}$	Sumber data dari Kantor perpustakaan daerah
		67	Pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10-58 thn)}}$	<input checked="" type="checkbox"/> Sumber data pembilang dari Kantor perpustakaan daerah <input checked="" type="checkbox"/> Sumber data penyebut dari Dukcapil
URUSAN PILIHAN						
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}}$	Sumber data dari Dinas Pertanian
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)
3	Pariwisata	5	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahunorang	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata atau buku PDRB sub sector Perdagangan (jasa, hotel, restoran) dg menggunakan harga berlaku

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Perindustrian	7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Perindustrian atau buku PDRB sector Industri Pengolahan (harga berlaku)
		8	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2017} - \text{Jumlah Industri tahun 2016}}{\text{Jumlah Industri s/d tahun 2017}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Perindustrian
5	Perdagangan	9	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Perdagangan atau buku PDRB sub sector Perdagangan (harga berlaku)
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	US\$	Sumber data dari Dinas Perdagangan
6	Transmigrasi	11	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100\%$%	Sumber data Dinas Transmigrasi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP	$\frac{\text{Jumlah program RKPDP tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$%	Sumber data pembilang dan Penyebut dari BAPPEDA

		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybsbuah	Sumber data dari Dinas Kominfo
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada/tidak*)	Sumber data dari Kantor PTSP / BP2TPM
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik di daerahKeg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKPKeg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)

TATA CARA PENYUSUNAN LPPD

PETUNJUK PENGISIAN SETIAP INDIKATOR KINERJA KUNCI



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8
JAKARTA PUSAT 10110**

PETUNJUK PENGISIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI

1. Keberadaan PERDA IMB

Definisi Operasional:

Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

PP Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 112, ayat (1): "Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung."

Prosedur pengisian:

Capaian kinerja untuk IKK Keberadaan PERDA IMB dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

Dokumen pendukung : Fotocopy **Perda atau Perkada** yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Peraturan Daerah Tentang Kependudukan

Definisi Operasional:

Regulasi yang mengatur penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Prosedur pengisian:

Capaian kinerja untuk IKK Perda tentang kependudukan dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

3. Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk.

Definisi Operasional:

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat menjadi PNS, bertugas sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan kententraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan (1 personil Satpol PP mampu melayani 50.000 penduduk)

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) per tanggal 31 Desember tahun 2017 pada Kantor Polisi Pamongpraja atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk sampai tanggal 31 Desember 2017.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

4. Ketepatan waktu penyampaian LPPD

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007, Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian LPPD Provinsi dari Ditjen Otda.
- 2) Tuliskan pernyataan "Tepat/Tidak Tepat" pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.

5. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan kinerja

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP 8/2006 Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah (APBN/APBD) selama suatu periode, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian Lapkeu dari Kementerian Keuangan.
- 2) Dapatkan tanda terima penyampaian Lakip dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
- 3) Tuliskan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
- 4) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian Laporan Keuangan dan Lakip sesuai tanda terima.

6. Urusan yang sudah diterapkan SPM-nya.

Definisi Operasional:

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar adalah: Urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Trantibum Linmas dan Urusan Sosial.

Prosedur pengisian:

Capaian kinerja untuk IKK ini dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kab/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

7. Kerjasama dengan Daerah Lain

Definisi Operasional:

Kesepakatan antar gubernur, dan/atau gubernur dengan bupati/wali kota, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban (kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain)

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah MOU atau kerjasama antar daerah yang masih berlaku sampai dengan tahun 2017, sumber data dari Biro Hukum, Setda Pemerintah Provinsi.
- 2) Tuliskan Judul, Nomor berserta tanggal MOU.

8. Kesesuaian Prioritas Pembangunan

Definisi Operasional:

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** dengan memperhatikan sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional. Sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2017 yaitu Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah prioritas pembangunan daerah dari Bappeda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2017.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

9. Rata-rata urusan wajib yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota.

Prosedur pengisian:

Capaian kinerja untuk IKK ini dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kab/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah seluruh kab/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

10. Waktu penetapan Perda APBD 2017

Definisi Operasional:

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dalam **Permendagri 31 Tahun 2016 tentang Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017** dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada lampiran pengesahan Perda APBD dimaksud.
- 2) Tuliskan pernyataan "Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penetapan Perda APBD.

11. Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Definisi Operasional:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada" pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

12. Belanja Untuk Pelayanan Dasar

Definisi Operasional:

Belanja Pelayanan dasar adalah total realisasi belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) dari urusan yang dikategorikan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, yaitu urusan Pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Linmas, Sosial, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tersebut. Realisasi belanja pelayanan tersebut diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban APBD (Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 sebelum di audit BPK). Sementara khusus untuk urusan pendidikan dan kesehatan, selain diambil dari Perangkat Daerah yang secara teknis menangani urusan tersebut (urusan pendidikan dari dinas pendidikan dan urusan kesehatan dari dinas kesehatan dan Rumah Sakit), realisasi belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan juga ditambahkan dengan jumlah realisasi belanja dari bantuan tunai ke lembaga pendidikan (HIBAH/BOS) dan kesehatan (HIBAH BLOOD) yang dilaporkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Perangkat Daerah dengan nama lain yang menjalankan fungsi sebagaimana BPKAD. pendidikan yang ada diseluruh Perangkat Daerah (Hibah).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi belanja pelayanan dasar dari Perda Pertanggungjawaban APBD atau Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah

- Tahun 2017 sebelum diaudit oleh BPK (karena Perda Pertanggungjawaban APBD masih menunggu Laporan Keuangan Daerah yang sudah di Audit BPK) untuk masing-masing Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan dasar;
- 2) Dapatkan data realisasi bantuan tunai ke lembaga pendidikan dan kesehatan yang dilaporkan ke BPKAD dari Perda Pertanggungjawaban APBD atau Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah sebelum di audit BPK;
 - 3) Dapatkan jumlah realisasi belanja Daerah tahun 2017 dari Laporan Keuangan Daerah tahun 2017 sebelum audit BPK;
 - 4) Tuliskan Belanja per urusan kedalam rumus yang sudah tersedia;
 - 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada kolom capaian kinerja.

13. Belanja Untuk Urusan Pendidikan Dan Kesehatan

Definisi Operasional:

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen, termasuk gaji) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar untuk urusan pendidikan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.
- 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 3) Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah tersedia.

14. Keberadaan Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar

Pelayanan Publik.

- 2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

15. Rasio PNS terhadap penduduk.

Definisi Operasional:

Perbandingan antara jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah provinsi. Idealnya persentase jumlah PNS adalah dua atau tiga persen dari jumlah penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab melaksanakannya. Di samping variabel jumlah penduduk, faktor luas wilayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN/APBD turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah PNS yang ideal.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah PNS s.d 31 Desember 2017 dari BKD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Penduduk s.d 31 Desember tahun 2017.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

16. Sistem Informasi Kepegawaian

Definisi Operasional:

Aplikasi berbasis database yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah yang bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan bukti kepemilikan Sistem Kepegawaian yang dilaksanakan pemerintah daerah dari Badan Kepegawaian Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

17. Jumlah Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2016

Definisi Operasional:

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kab/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait.
- 2) Isikan dan rinci jumlah per Perangkat Daerah data tersebut pada kolom yang sudah tersedia.

18. Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017

Definisi Operasional:

Produk Hukum Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ketentuan Pasal 1 ayat 4). Produk Hukum Daerah diterbitkan oleh kepala daerah dalam pengaturan atau regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah mendapat persetujuan DPRD.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2017 dari Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi.
- 2) Tuliskan nomor dan tanggal perda yang ditetapkan.

19. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017

Definisi Operasional:

Mengacu Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 16 ayat 1 bahwa hasil penyusunan propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017 dari Biro hukum,

- Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah rancangan perda-perda yang diusulkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

20. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.

Definisi Operasional:

Dalam rangka efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Keputusan DPRD yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2017 dari Sekretariat Dewan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh Keputusan DPRD yang dikeluarkan pada tahun 2017 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

21. Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti.

Definisi Operasional:

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dari Biro Hukum.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Keputusan Gubernur yang dikeluarkan pada tahun 2017 dari Biro Hukum.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

22. Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dari Biro Hukum.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Peraturan Gubernur yang dikeluarkan pada tahun 2017 dari Biro Hukum.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

23. Jumlah PERDA yang dibatalkan

Definisi Operasional:

Prosedur pembatalan perda diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai perda-perda yang dibatalkan dari Biro Hukum;
- 2) Dapatkan pula data perda-perda yang dikirimkan untuk dievaluasi dari Biro Hukum.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

24. Keberadaan Perda atau Peraturan Gubernur terkait dengan konsultasi publik.

Definisi Operasional:

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah.
- 2) Sebutkan legal formalnya.

- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

25. Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, leaflet/brosur). Prosedur pengisian:

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan bukti kepemilikan media informasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Gubernur dari Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait;
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

26. Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi Dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula anggaran dana perimbangan (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

27. Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data total realisasi belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data realisasi Dana Alokasi Umum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh

BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

28. Belanja Langsung terhadap total APBD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi total belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

29. Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

30. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2016 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

31. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan** terhadap total pendapatan

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

32. Rasio Realisasi PAD terhadap Anggaran Pendapatan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Realisasi PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data anggaran pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

33. Realisasi belanja terhadap anggaran belanja

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Realisasi belanja APBD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2016 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

34. Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Hasil **Rekonsialisasi Rekomendasi/Temuan BPK** dalam LHP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah tahun anggaran 2017 yang telah ditindaklanjuti pemda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula jumlah seluruh rekomendasi/temuan BPK RI per 31 Desember 2017 dari Inspektorat Provinsi atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

35. Realisasi PAD 2017 terhadap Potensi PAD

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data potensi PAD dalam RKPD atau RPJMD tahun 2015-2019 **untuk proyeksi PAD Tahun 2017** dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

36. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total PAD tahun 2017 dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data total PAD tahun 2016 dalam LRA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

37. Penghargaan dari pemerintah pusat yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah pusat (tidak termasuk penghargaan dari Luar Negeri), data berasal dari Biro Humas, protokol Setda Pemerintah Provinsi.
- 2) Tuliskan nama dan jenis penghargaan yang diterima pada kolom LPPD.

38. Keberadaan E-procurement

Definisi Operasional:

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau E-Procurement di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan fotokopi peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa.
- 2) IKK ini capaian kerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan melainkan pernyataan “ada atau tidak ada”).
- 3) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta;
- 4) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

39. Jumlah Persetujuan Investasi

Definisi Operasional:

Persetujuan Investasi adalah Izin investasi yang sudah teregister pada tahun 2017 dan bersumber dari **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** yang nilai izin investasinya lebih besar atau sama **dengan 500 juta rupiah** (Perka BKPM No. 5 Tahun 2013), yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/Badan

Penanaman Modal Daerah. Data Dituangkan dalam bentuk table yang berisi nama perusahaan, tanggal izin, dan nilai investasi.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah izin investasi yang menunjukkan nilai investasi diperoleh dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 2) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

**PETUNJUK PENGISIAN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI**

1. Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program Nasional masih mengacu pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2010

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data program nasional per urusan yg dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan **RKP** sebagaimana Perpres 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Dapatkan pula data jumlah program nasional perurusan yang sudah ditetapkan Pemerintah.
- 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 3) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

2. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP).

Definisi Operasional:

SOP yang dimaksud adalah **SOP teknis** sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian/LPNK dari masing-masing Perangkat Daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data SOP-SOP teknis sesuai dengan kebijakan Teknis yang ditetapkan oleh pemerintah
- 2) h cq Kementerian/LPNK dari masing-masing Perangkat Daerah.
- 3) Pilihlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 4) Tuliskan Judul SOP pada kolom yang tersedia.

3. Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. (Normalisasi)

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data Perda-Perda yg dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah per urusan berdasarkan Peraturan Menteri terkait.
- 2) Dapatkan pula jumlah Seluruh Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

4. Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi.

Definisi Operasional:

Jumlah jabatan yang ada pada perangkat daerah dapat dilihat pada Struktur Organisasi perangkat daerah. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan yang diisi oleh pejabat definitif.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah jabatan yang ada (yang di isi) per urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada masing-masing Perangkat Daerah. (Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.
- 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 3) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 4) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu, diperhitungkan pada urusan yang dominan.

5. Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 2) Yang dihitung adalah nama jabatan fungsional, bukan jumlah pemangku jabatan.
- 3) Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 4) Tuliskan nama jabatan fungsional pada kolom yang tersedia.

6. Rasio PNS Kabupaten.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah PNS per urusan pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Perangkat Daerah atau data kepegawaian BKD.
- 2) Dapatkan pula data jumlah total seluruh PNS per 31 Desember 2017 dari Perangkat Daerah atau BKD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

7. Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan sesuai penjenjangan.

Definisi Operasional:

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Thn 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Juklak PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjejang per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing Perangkat Daerah.
- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

8. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Thn 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing perangkat daerah;
 - 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah;
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

9. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA , RENJA , RKA) dari masing-masing PD.
- 2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang tersedia.

10. Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data program RKPD per urusan yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah;
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh program per urusan dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

11. Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang di akomodir dalam RKA Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data Program RENJA Perangkat Daerah per urusan yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah per urusan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

12. Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah per urusan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

13. Total Alokasi Anggaran Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total anggaran Perangkat Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Dapatkan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

14. Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Dapatkan pula data realisasi total belanja Perangkat Daerah dari BPKAD, Bappeda

atau instansi yang terkait.

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15. Realisasi Belanja Pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa.

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2) Dapatkan pula data realisasi belanja barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

16. Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian:

1) Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2) Dapatkan pula data total realisasi belanja Perangkat Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

17. Keberadaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk).

Prosedur Pengisian :

1) Dapatkan data Laporan Keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah.

2) Tuliskan pernyataan "ada/Tidak ada" pada kolom yang tersedia.

18. Adanya Inventaris Barang atau Asset Perangkat Daerah.

Definisi Operasional:

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca. Dalam akuntansi, termasuk dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP No. 24/2005, istilah barang disebut aset. Dalam pelaporan barang di Neraca oleh Perangkat Daerah dan Pemda, istilah barang diganti dengan aset, yang terbagi ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Inventarisasi aset dilakukan 5 (lima) tahun sekali dan dokumen pendukung Inventarisasi aset dalam bentuk Berita Acara Inventarisasi.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data hasil inventarisasi barang/aset Perangkat Daerah yang dilakukan
- 2) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

19. Jumlah Asset yang tidak digunakan.

Definisi Operasional:

Asset yang tidak digunakan adalah asset yang dalam kondisi baik tapi tidak dimanfaatkan untuk operasional Perangkat Daerah, bukan asset rusak yang akan diusulkan untuk dihapus.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data asset yang tidak digunakan per urusan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam satuan rupiah.
- 2) Dapatkan pula Asset yang dikuasai Perangkat Daerah dalam satuan rupiah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

20. Jumlah fasilitas / prasarana informasi.

Fasilitas / Prasarana informasi adalah prasarana seperti papan pengumuman, kotak - saran, leaflet, mobil keliling dan media informasi.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data terkait kepemilikan fasilitas/prasarana informasi.
- 2) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

21. Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat yang dimaksud adalah survey kepuasan terhadap suatu layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan (Perangkat Daerah) dengan atau tidak melibatkan pihak akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berguna untuk mengukur kepuasan masyarakat atau keberhasilan suatu layanan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data laporan hasil survey kepuasan dari masing- masing Perangkat Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “ada/tidak ada” pada kolom yang tersedia.

PETUNJUK PENGISIAN
PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH PROVINSI

“Prosedur kerja untuk menghitung capaian kinerja disajikan hanya sebagian urusan saja sedangkan urusan lainnya dapat mencontoh pada prosedur kerja yang ada, karena pada prinsipnya untuk menghitung capaian kinerja setiap indicator kinerja menggunakan prosedur yang sama”.

1. URUSAN PENDIDIKAN

Pendidikan Luar Biasa (PLB) adalah pendidikan yang diberikan kepada siswa yang menyandang cacat ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di wilayah provinsi tersebut.

1. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI,
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

2. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTs

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTs
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

3. Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 5) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 6) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

4. Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) jenjang SMA/SMK/MA Paket C

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa usia 16–18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA Paket C dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

5. Angka Kelulusan (AK) jenjang SMA/SMK/MA

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang mengikuti ujian
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

6. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMA/SMK/MA

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat jenjang SMA/SMK/MA dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

7. Angka Melanjutkan (AM) jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dan Paket C

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dari daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs, tahun ajaran sebelumnya.

8. Pembinaan Guru jenjang SD/MI

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah guru jenjang SD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

9. Pembinaan Guru jenjang SMP/MTs

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah Guru jenjang SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah guru jenjang SMP/MTs
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

10. Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah guru jenjang SMA/SMK/MA.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

11. Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu.

Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menaikan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Prosedur Kerja:

- 1) Dapatkan laporan kegiatan mengenai kegiatan penjaminan mutu pendidikan dari Dinas Pendidikan.
- 2) Bila ada isikan pada pada kolom capaian kinerja.

2. URUSAN KESEHATAN

Definisi Operasional:

Capaian kinerja kesehatan untuk provinsi yang terdiri dari 8 IKK dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kesehatan dari kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Contoh : Pada suatu Provinsi terdapat 3 kabupaten dan 1 kota, dengan demikian jumlah pemda di provinsi tersebut adalah 4 pemda. Capaian kinerja A,B,C,D masing-masing pemda adalah 70%, 80%, 60%, dan 70%.

Dengan demikian perhitungannya :

$$\begin{aligned}\text{Capaian kinerja A Provinsi} &= \frac{70\% + 80\% + 60\% + 70\%}{4} \\ &= \frac{280\%}{4} = 70\%\end{aligned}$$

12. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani.

Definisi Operasional :

Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONE, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja IKK Cakupan Kebidanan Yang Ditangani diperoleh dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

13. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Definisi operasional :

Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja IKK Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan diperoleh dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

14. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Definisi operasional :

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 - 11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja IKK Cakupan Desa/Kelurahan UCI diperoleh dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota yang ada diwilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

15. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan.

Definisi operasional :

Balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja IKK Balita Gizi Buruk diperoleh dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota yang ada diwilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

16. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA.

Definisi Operasional:

Angka penemuan pasien baru TBC, BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus/penderita baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja IKK Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC, BTA diperoleh dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota yang ada diwilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

17. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.

Definisi operasional :

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja IKK Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD diperoleh dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

18. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin.

Definisi Operasional :

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 (puskesmas) di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja IKK Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diperoleh dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

19. Cakupan Kunjungan Bayi

Definisi Operasional :

Cakupan bayi (anak berumur 29 hari s/d 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja IKK Cakupan Kunjungan Bayi diperoleh dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

20. Pencemaran Udara

Definisi Operasional:

Pencemaran Udara adalah suatu kondisi dimana udara sudah tercemar oleh bahan kimia, zat atau partikel dan juga bahan biologi lainnya yang bisa membahayakan

kesehatan makhluk hidup.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK Pencemaran udara dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

21. Kebersihan

Definisi Operasional:

Kebersihan yang dimaksud adalah kebersihan kondisi pasar tradisional, pasar tradisional kondisi baik minimal memiliki kriteria: pembagian area/kios sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat klasifikasinya seperti, basah, kering, penerangan yang cukup, tersedia fasilitas umum seperti sanitasi, MCK, tempat parkir, TPS dll.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK Kebersihan dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

22. Tempat pembuangan sampah (TPS)

Definisi Operasional:

TPS adalah tempat yang digunakan untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat sementara untuk selanjutnya diteruskan ketempat pembuangan akhir (TPA)

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja IKK Tempat Pembuangan sampah dihasilkan dari agregasi, capaian kinerja kab/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

23. Penegakan Hukum Lingkungan

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK Penegakan hukum lingkungan dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang

bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

24. Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik

Definisi Operasional:

Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dengan kriteria bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, nyaman, memiliki drainase, memiliki rambu-rambu lalu lintas, dan memiliki penerangan. Data bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang terkait.
- 2) Dapatkan pula data panjang seluruh jalan provinsi di provinsi tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

25. Rumah Tangga Per Sanitasi

Definisi Operasional:

Kriterianya rumah tangga yang sanitasinya sekurang- kurangnya mempunyai akses fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), pembuangan sampah.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja rumah tangga bersanitasi dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kab/kota diwilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

26. Kawasan Kumuh

Definisi Operasional:

Kawasan kumuh adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama (tempat permukiman, pemusatan, distribusi pelayanan sosial dan ekonomi) namun tidak sesuai dengan susunan fungsi kawasan. Kawasan kumuh dikelompokkan berdasarkan beberapa

kriteria yaitu kepadatan penduduk eksisting, tata letak bangunan, keadaan konstruksi, ventilasi, kepadatan bangunan, keadaan jalan, drainase, pemakaian air bersih, pembuangan limbah manusia, dan pembuangan sampah.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja kawasan kumuh dihasilkan dari agregasi capaian kinerja kawasan kumuh kab/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

27. Rasio Ruang Terbuka Hijau

Definisi Operasional:

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah. Penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum antara lain taman-taman milik Pemda, Hutan Kota yang berada di kota, Daerah Aliran Sungai (DAS), Tempat Pemakaman Umum (TPU), Termasuk Hutan Lindung). Kriteria mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK Ruang Terbuka Hijau dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

5. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

28. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Definisi Operasional:

Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Kriteria air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari (cuci, mandi dan minum) yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, sumur yang lokasi

penampungannya berjarak kurang lebih 20 meter dari septic tank, dan air yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Prosedur Kerja:

Capaian IKK Cakupan Pengguna Air Bersih dihasilkan dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

29. Rumah Layak Huni

Definisi Operasional:

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria/persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (ada ventilasi, penerangan serta minimal lantai terbuat dari tanah/kayu).

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK rumah tangga pengguna air bersih dan rumah layak huni dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

6. KEPEMUDAAN & OLAHRAGA

30. Gelanggang/balai Remaja

Definisi Operasional:

Lokasi yang dipergunakan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas seni, tari, dsb yang fasilitasnya milik pemerintah.

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja IKK ini dihasilkan dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

31. Lapangan Olahraga

Definisi Operasional:

Lapangan Olah Raga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu

pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Setiap jenis olahraga diperlukan sarana lapangan untuk tempat berlangsungnya aktivitas. Secara garis besar beberapa jenis olah raga yang membutuhkan sarana lapangan adalah Bola Voli, Sepak Bola, Basket, dan Badminton serta Kolam Renang. Untuk setiap jenis lapangan memiliki ukuran atau dimensi yang berbeda-beda.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk Lapangan olahraga dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

7. URUSAN PENANAMAN MODAL

32. Kenaikan/Penurunan Nilai PMDN

Definisi Operasional:

Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN didapatkan dari PTSP atau dinas terkait, yang merupakan jumlah seluruh nilai investasi dalam tahun yang bersangkutan.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Tahun 2017 dalam milyar rupiah dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN tahun 2016 dalam milyar rupiah dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

8. URUSAN KOPERASI DAN UKM

33. Koperasi Aktif

Definisi Operasional:

Koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha, dan melampirkan data hasil RAT.

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja Koperasi Aktif dihasilkan dari agregasi capaian kinerja kabupaten/kota

yang ada diwilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

34. Usaha Makro dan Kecil

Definisi Operasional:

UKM adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tempat usaha.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK ini yaitu jumlah Koperasi dan Usaha Makro dan Kecil dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

9. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

35. Ketersediaan adanya database kependudukan untuk skala provinsi

Prosedur Kerja :

- 1) IKK ini capaian kinerjanya diisi menggunakan pernyataan “ada atau tidak ada”;
- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi.
- 3) Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- 4) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

10. URUSAN TENAGA KERJA

36. Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja/BPJS Ketenagakerjaan

Definisi Operasional:

Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja/BPJS Ketenagakerjaan adalah pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja untuk menjamin kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian sesuai dengan penahapan kepesertaan.

37. Pencari kerja yang ditempatkan

Definisi Operasional:

Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang telah mendaftarkan diri ke

Dinas Tenaga Kerja dan sudah ditempatkan atau sudah mendapatkan pekerjaan.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial dan Pencari kerja yang ditempatkan dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

11. URUSAN PANGAN

38. Regulasi Ketahanan Pangan

Prosedur Kerja :

- 1) IKK ini capaian kinerjanya diisi menggunakan pernyataan ada atau tidak ada.
- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.

Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

39. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama yang dimaksud ketersediaan pangan berupa padi, jagung, ubi, ketela, sagu dan kedelai.

Prosedur Kerja:

Capaian kinerja untuk IKK ini yaitu jumlah ketersediaan pangan utama yang dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

12. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

40. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Definisi Operasional:

Partisipasi perempuan adalah pekerja perempuan usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan, dan berkerja di lembaga pemerintah. Pekerja perempuan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak termasuk yang ada di instansi vertikal.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah.
- 2) Dapatkan pula data jumlah pekerja perempuan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

41. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Definisi Operasional:

Partisipasi perempuan adalah pekerja perempuan usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan, dan berkerja di lembaga pemerintah. Pekerja perempuan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak termasuk yang ada di instansi vertikal.

Prosedur Kerja :

- 4) Dapatkan data jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah.
- 5) Dapatkan pula data jumlah pekerja perempuan.
- 6) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

13. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

42. Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif

Definisi Operasional:

Proporsi antara jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS).

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK jumlah tingkat prevalensi peseta KB aktif yang dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan

43. Rasio Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB) di setiap kelurahan

Definisi Operasional:

Perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB secara Nasional adalah antara 4-5 desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas,tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan,pelayanan,pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB. Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah

jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK Ratio Petugas lapangan KB(PLKB/PKB) di setiap kelurahan yang dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

14. URUSAN PERHUBUNGAN

44. Angkutan Darat dibandingkan dengan Jumlah Penumpang

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK jumlah angkutan darat yang dibandingkan dengan jumlah penumpang yang dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

45. Web site milik pemerintah daerah

Prosedur Kerja:

Tulis jenis dan nama website milik pemerintah daerah pada kolom Capaian Kinerja.

46. Pameran/Expo

Definisi Operasional:

Pameran/Expo yang dimaksud adalah pameran yang berskala nasional/internasional sebagai penyelenggara atau peserta yang dilengkapi dengan data dukung seperti: undangan dan dokumentasi.

Prosedur Kerja :

Dapatkan jumlah Pameran/expo yang dimaksud yang dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.

16. URUSAN PERTANAHAN

47. Luas Lahan Bersertifikat

Definisi Operasional:

Luas lahan yang bersertifikat yang dimaksud adalah lahan bersertifikat yang merupakan milik pemerintah daerah.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK jumlah **luas lahan bersertifikat** yang dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

17. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

48. PKK Aktif

Definisi Operasional:

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Organisasi PKK tersebut selalu aktif melakukan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK ini yaitu jumlah PKK yang aktif yang dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan dibagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

18. URUSAN SOSIAL

49. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Definisi Operasional:

Sarana sosial yang dikelola atau milik pemerintah daerah, atau sarana sosial milik swasta yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah sarana sosial di Dinas Sosial.
- 2) Masukkan jumlah sarana sosial kolom capain kinerja dalam satuan buah.

50. Penyandang Masalah Ketunaan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial

Definisi Operasional:

Penyandang Masalah Kesejahteraan social (PMKS) adalah perorangan, keluarga, atau

komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dan data PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial di Dinas Sosial.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

19. URUSAN KEBUDAYAAN

51. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dimaksud adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan data dukung (laporan kegiatan dan dokumentasi).

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2017 di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan jumlah penyelenggaraan/kali.

52. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Definisi Operasional:

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dimaksud adalah gedung/panggung permanen milik pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan seni budaya.

Prosedur Kerja:

- 1) Dapatkan data jumlah sarana penyelenggaraanseni dan budaya di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

20. URUSAN STATISTIK

53. Penyusunan buku "Provinsi Dalam Angka"

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan buku "Provinsi dalam angka" tahun 2017 di Kantor Statistik atau Bappeda.
- 2) Masukkan ke kolom capain kinerja, apabila pemda telah memiliki buku "Provinsi dalam angka" tahun 2017 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

54. Penyusunan Buku "PDRB Provinsi"

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan buku PDRB Provinsi tahun 2017 di Kantor Statistik atau Bappeda.
- 2) Masukkan ke kolom capain kinerja, apabila pemda telah memiliki buku PDRB Provinsi dalam angka tahun 2017 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

21. URUSAN KEARSIPAN

55. Pengelolaan Arsip secara Baku

Definisi Operasional:

Pengelolaan arsip secara baku adalah pengelolaan arsip yang sudah sesuai dengan peraturan perundangan tentang kearsipan yang sudah baku.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Perangkat Daerah dan jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

56. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Definisi Operasional:

Peningkatan SDM Pengelolaan Arsip adalah kegiatan bimtek/diklat kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas/Bagian Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan.

Prosedur kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan kepada petugas pengelola pengarsipan di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

22. URUSAN PERPUSTAKAAN

57. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah koleksi judul buku dan koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

58. Pengunjung perpustakaan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2017 dan jumlah populasi orang yang harus dilayani **usia 4-59 tahun** di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Produksi Perikanan

Definisi Operasional:

Produksi perikanan adalah jumlah ikan yang dihasilkan di suatu daerah dalam satu tahun yang berjalan.

Prosedur pengisian :

Capaian kinerja produksi perikanan dihasilkan dari agregasi capaian kinerja produksi perikanan kab/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan.

2. Ekspor Hasil Perikanan

Definisi Operasional:

Produksi ikan yang dihasilkan dalam satu tahun pada suatu daerah yang di ekspor.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data nilai ekspor perikanan per tahun dan dapatkan pula target ekspor perikanan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan.

3. Konsumsi Ikan

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK ini yaitu jumlah konsumsi ikan per tahun yang dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi, dibagi jumlah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan.

2. URUSAN PERTANIAN

4. Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK ini yaitu jumlah produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar yang dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi dibagi jumlah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan.

5. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2016 dan data PDRB khusus sektor pertanian di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitunganb pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

3. URUSAN KEHUTANAN

6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Definisi Operasional:

Lahan Kritis adalah lahan yang tidak produktif meskipun dikelola produktifitas lahan sangat rendah bahkan dapat terjadi hasil produksi yang diterima jauh lebih sedikit dari biaya produksinya. Lahan kritis bersifat tandus, gundul dan tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian karena tingkat kesuburan rendah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total lahan kritis dan lahan kritis yang berhasil direhabilitasi di Dinas Kehutanan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

7. Kerusakan Kawasan Hutan

Definisi Operasional:

Kerusakan hutan disebabkan oleh kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, pembabatan hutan dengan sengaja.

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data luas kawasan hutan dan luas kerusakan kawasan hutan di Dinas Kehutanan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

4. URUSAN ENERGI DAN SDM

8. Pertambangan tanpa ijin/liar

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data luas area penambangan dan luas penambangan liar yang ditertibkan di Dinas Pertambangan dan Energi.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

9. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2017 berdasarkan Harga Yang Berlaku dan data PDRB khusus sektor pertambangan di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

5. URUSAN PARIWISATA

10. Kunjungan wisata

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK ini yaitu jumlah kunjungan wisata yang dihasilkan dari agregasi

terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan, perhitungannya lihat cara perhitungan capaian kinerja urusan kesehatan.

11. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Prosedur kerja:

- 1) Dapatkan data totalPDRB tahun 2017 dan data PDRB khusus sektor pariwisata di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

6. URUSAN INDUSTRI

12. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

- Prosedur pengisian
- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2016 dan data PDRB khusus sektor industri di Kantor Statistik.
 - 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
 - 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

13. Pertumbuhan industri secara keseluruhan.

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK pertumbuhan industri secara keseluruhan dihasilkan dari

agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan.

7. URUSAN PERDAGANGAN

14. Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2017 berdasarkan Harga Yang Berlaku dan data PDRB khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

15. Ekspor bersih perdagangan

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data realisasi ekspor (Rp) dan realisasi impor (Rp) di Kantor Statistik atau Dinas Perdagangan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capain kinerja dalam satuan %.

8. URUSAN TRANSMIGRASI

Prosedur Kerja :

Capaian kinerja untuk IKK Transmigrasi swakarsa dihasilkan dari agregasi terhadap capaian kinerja kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi, dibagi jumlah kabupaten/kota yang diwilayah provinsi yang bersangkutan.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sistim Informasi Manajemen Pemda

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda melalui sekretariat daerah dan BPKD.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah sistem informasi manajemen pemda yang diimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

2. Tapal Batas

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan.
- 2) Dapatkan pula jumlah permasalahan perbatasan antar kabupaten/kota yang dilaporkan.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD

Prosedur Kerja :

- 1) IKK ini capaian kerjanya diisi dengan menggunakan pernyataan “ada atau tidak ada”;
- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- 3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

4. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD

Prosedur Kerja :

- 1) IKK ini capaian kerjanya diisi dengan menggunakan pernyataan “ada atau tidak ada”;
- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- 3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

5. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD

Prosedur Kerja :

- 1) IKK ini capaian kerjanya diisi dengan menggunakan pernyataan “ada atau tidak ada”;
- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- 3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

6. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah program RKPD tahun berkenaan dari Dinas Bappeda atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Pembinaan Politik di daerah

Definisi Operasional:

Kegiatan pembinaan politik di daerah adalah kegiatan politik yang dilaksanakan oleh Tramtibum dan Linmas selama tahun 2017 yang dibiayai dengan dana APBD dan dilampirkan laporan pelaksanaan kegiatan

Prosedur pengisian :

Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2017 di Kantor Kesbanglinmas.

Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah dalam satuan kali.

2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Definisi Operasional:

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbanglinmas selama tahun 2017 yang dibiayai dari APBD berupa kegiatan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilengkapi laporan pelaksanaan kegiatan atau dokumentasi.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP selama tahun 2017 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam satuan kali.

**PETUNJUK PENGISIAN
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH KOTA**

1. Keberadaan PERDA IMB

Definisi Operasional:

Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

PP Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 112, ayat (1) : "Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung."

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur perizinan tentang izin mendirikan bangunan (bukan perda yang mengatur biaya atau retribusinya).
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

2. Rasio Rumah ber-IMB

Definisi Operasional:

Perbandingan jumlah seluruh rumah yang memiliki IMB dengan jumlah total seluruh rumah di wilayah perkotaan dari tahun pembentukan daerah sampai dengan 31 Desember 2017.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah rumah ber IMB sd. akhir tahun (31 Desember 2017) penyusunan LPPD dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh rumah sd. akhir tahun penyusunan LPPD.

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

3. Keberadaan PERDA RTRW.

Definisi Operasional:

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Peraturan tentang ketertiban penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang ketertiban penataan ruang.

2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

4. Pengurusan E-KTP

Definisi Operasional:

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penertiban Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Prosedur pengisian :

1) Dapatkan data Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP pada Dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi terkait.

2) Dapatkan pula data jumlah penduduk yang wajib ber-KTP sampai akhir tahun (31 Desember 2017).

3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

5. Biaya KTP

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 79A berbunyi “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- 2) Sebutkan legal formalnya.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

6. Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk.

Definisi Operasional:

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat menjadi PNS, bertugas sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dibandingkan dengan 10.000 penduduk (di luar tenaga administrasi/kesekretariatan).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) pada tahun penyusunan LPPD pada Kantor Polisi Pamongpraja atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk sampai akhir tahun penyusunan LPPD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

7. Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS.

Definisi Operasional:

Aspek yang dinilai mengenai ketenteraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang penanganan PSK,PKL,atau PMKS.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang PSK, PKL, atau PMKS.
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang tersedia.

8. Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kota.

Definisi Operasional:

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang kebersihan Kota, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang kebersihan Kota.
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

9. Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007.

Definisi Operasional:

Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian LPPD Kabupaten/Kota dari Biro Pemerintah Setda Provinsi.
- 2) Tuliskan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD.
- 4) Tuliskan Tepat atau Tidak Tepat

10. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah (APBN/APBD) selama suatu periode, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian Laporan Keuangan dari Kementerian Keuangan.
- 2) Tuliskan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.

11. Ketepatan waktu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Prosedur pengisian :

1. Dapatkan tanda terima penyampaian Lakip dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
2. Tuliskan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
3. Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.

12. Urusan yang sudah diterapkan SPM-nya

Definisi Operasional:

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar adalah urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman, Trantibum Linmas dan Sosial.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data masing-masing indikator SPM yang tertuang dalam program per urusan yang sudah diterapkan SPMnya dalam RKA Perangkat Daerah atau DPA Perangkat Daerah tahun 2017 sebagai elemen data pengisian IKK tersebut.
- 2) Isikan urusan yang sudah diterapkan SPMnya oleh Pemerintah Kota.

13. Kerjasama Dengan Daerah Lain/MOU.

Definisi Operasional:

Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan atau kerjasama antar pemerintah daerah, kesepakan antar pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, antar pemerintah kota dengan pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kota lainnya

dalam satu propinsi atau provinsi lainnya yang dibuat secara tertulis.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah MoU atau kerjasama antar daerah yang masih berlaku pada tahun 2017 dari Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota.
- 2) Tuliskan Judul, Nomor berserta tanggal MoU.

14. Kesesuaian Prioritas Pembangunan.

Definisi Operasional:

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhatikan sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2016 yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah prioritas pembangunan daerah dari Bapedda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2016.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah Sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pada APBD tahun 2017. Data berasal dari Bapedda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2016.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

16. Waktu penetapan Perda APBD 2017.

Definisi Operasional:

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (1) Permendagri 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2017 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2016”.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada lampiran pengesahan Perda APBD dimaksud.
- 2) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penetapan Perda APBD.
- 3) Tuliskan pernyataan “Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.

17. Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah

Definisi Operasional:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada atau Tidak ada” pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah

18. Belanja Untuk Pelayanan Dasar.

Definisi Operasional:

Belanja Pelayanan dasar adalah total realisasi belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung dari urusan yang dikategorikan urusan pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman, Trantibum dan Linmas, Sosial yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tersebut. Realisasi belanja pelayanan tersebut diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban APBD (Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 sebelum di audit BPK).Sementara khusus untuk urusan pendidikan dan kesehatan, selain diambil dari Perangkat Daerah yang secara teknis menangani urusan tersebut(urusan pendidikan dari dinas pendidikan dan urusan kesehatan dari dinas kesehatan dan RUmah Sakit), realisasi belanja untuk urusan

pendidikan dan kesehatan juga ditambahkan dengan jumlah realisasi belanja dari bantuan tunai ke lembaga pendidikan dan kesehatan yang dilaporkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Perangkat Daerah dengan nama lain yang menjalankan fungsi sebagaimana BPKAD.

Prosedur pengisian :

1. Dapatkan data realisasi belanja pelayanan dasar dari Perda Pertanggungjawaban APBD atau Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 sebelum diaudit oleh BPK (karena Perda Pertanggungjawaban APBD masih menunggu Laporan Keuangan Daerah yang sudah di Audit BPK) untuk masing-masing Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan dasar;
2. Dapatkan data realisasi bantuan tunai ke lembaga pendidikan dan kesehatan yang dilaporkan ke BPKAD dari Perda Pertanggungjawaban APBD atau Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah sebelum di audit BPK.
3. Dapatkan jumlah realisasi belanja Daerah tahun 2017 dari Laporan Keuangan Daerah tahun 2017 sebelum audit BPK
4. Tuliskan Belanja per urusan kedalam rumus yang sudah tersedia.
5. Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada kolom capaian kinerja.

19. Belanja Untuk Urusan Pendidikan Dan Kesehatan.

Definisi Operasional:

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen, termasuk gaji) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundangundangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD dan Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar untuk urusan pendidikan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.
- 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 3) Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah tersedia.

20. Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik.
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

21. Rasio PNS terhadap penduduk.

Definisi Operasional:

Perbandingan antara jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah provinsi. Idealnya persentase jumlah PNS adalah 2% sd 3 % (dua atau tiga persen) dari jumlah penduduk.

Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab melaksanakannya.

Di samping variabel jumlah penduduk, faktor luas wilayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN/APDB turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah PNS yang ideal.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah PNS s.d 31 Desember 2017 dari BKD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Penduduk s.d 31 Desember tahun 2017.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

22. Sistem Informasi Kepegawaian

Aplikasi berbasis database yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah yang bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan bukti kepemilikan Sistem Kepegawaian yang dilaksanakan pemerintah daerah dari Badan Kepegawaian Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

23. Jumlah Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016**.

Definisi Operasional:

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. **Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah** setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait.
- 2) Isikan dan rinci jumlah per Perangkat Daerah data tersebut pada kolom yang sudah tersedia.

24 Jumlah PERDA yang ditetapkan pada tahun 2017

Definisi Operasional:

Produk Hukum Daerah berdasarkan berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang **Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan**

oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah ([Ketentuan Pasal 1 ayat 4](#)). Produk Hukum Daerah diterbitkan oleh kepala daerah dalam pengaturan atau regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah mendapat persetujuan DPRD.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2017 dari Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi.
- 2) Tuliskan nomor dan tanggal perda yang ditetapkan.

25 Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017

Definisi Operasional:

Mengacu Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 16 ayat 1 bahwa hasil penyusunan propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017 dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah rancangan perda-perda yang diusulkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

26. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2017 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD pada tahun 2017 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

27. Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Keputusan Walikota yang dikeluarkan pada tahun 2017 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

28. Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Peraturan walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Peraturan walikota yang dikeluarkan pada tahun 2017 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

29. Jumlah PERDA yang dibatalkan

Definisi Operasional:

Prosedur pembatalan perda diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai perda-perda yang dibatalkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data perda-perda yang dikirimkan untuk dievaluasi dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

30. Keberadaan PERDA/Perwali terkait dengan Konsultasi Publik

Definisi Operasional:

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah.
- 2) Sebutkan legal formalnya.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau Perkada lainnya.

31. Adanya Media Informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan bukti kepemilikan media informasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan walikota dari Dinas-Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait.
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

32. Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula anggaran dana perimbangan (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

33. Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total realisasi belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data realisasi Dana Alokasi Umum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

34. Belanja Langsung terhadap total APBD

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi total belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

35. Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

36. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2017 dari instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2016 instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

37. Sisa Pembiayaan Lebih Tahun Berkenaan (SILPA) terhadap total pendapatan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

38. Realisasi belanja terhadap total anggaran belanja

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Realisasi belanja APBD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

39. Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Hasil Rekonsiliasi Rekomendasi/Temuan BPK dalam LHP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah tahun anggaran 2017 yang telah tuntas ditindaklanjuti pemda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula jumlah seluruh rekomendasi BPK RI per 31 Desember 2017 dari Inspektorat Provinsi atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

40. Realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2016 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2015-2019 untuk proyeksi PAD tahun 2017 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

41. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total PAD tahun 2017 dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total PAD tahun 2016 dalam LRA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

42. Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah (tidak termasuk penghargaan dari luar negeri), data berasal dari Biro Humas, protokol Setda Pemerintah Provinsi.
- 2) Tuliskan nama dan jenis penghargaan yang diterima pada kolom LPPD.

43. Keberadaan E-procurement

Definisi Operasional:

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau E-Procurement di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan fotokopi peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa.
- 2) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan melainkan pernyataan “ada atau tidak ada”).
- 3) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta;
- 4) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

44. Jumlah persetujuan investasi

Definisi Operasional:

Persetujuan Investasi adalah Izin investasi yang sudah teregister pada tahun 2017 dan bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilai izin investasinya lebih besar atau sama dengan 200 juta rupiah, yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Data

Dituangkan dalam bentuk table yang berisi nama perusahaan, tanggal izin, dan nilai investasi.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah izin investasi/izin prinsip Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) nilai izin investasinya lebih besar daana tau sama dengan Rp200.000.000,- (\geq Rp200.000.000,-) yang sudah teregistrasi di PTSP/BPMD.
- 2) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

PETUNJUK PENGISIAN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH KOTA

1. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data program nasional per urusan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan RKP tahun 2017 sebagaimana Perpres 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
- 2) Dapatkan pula data jumlah program nasional per urusan yang sudah ditetapkan Pemerintah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

2. Keberadaan Standard Operating Procedur (SOP)

Definisi Operasional:

SOP yang dimaksud adalah SOP teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq.Kementerian/LPNK dari masing-masing Perangkat Daerah, tidak termasuk SOP yang rutin.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jenis SOP teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian/LPNK dari masing-masing Perangkat Daerah (dalam bentuk rekapitulasi).
- 2) Dipilah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 3) Tuliskan Judul SOP pada kolom yang tersedia.

3. Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut

PERMEN.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data Perda-Perda yg dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah per urusan berdasarkan Peraturan Menteri terkait.
- 2) Dapatkan pula jumlah Seluruh Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

4. Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah jabatan yang ada (yang diisi) per urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada masing-masing Perangkat Daerah. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung).
- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.
- 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

5. Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 2) Yang dihitung adalah nama jabatan fungsional, bukan jumlah pemangku jabatan.
- 3) Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 4) Tuliskan nama jabatan fungsional pada kolom yang tersedia.

6. Rasio PNS Kabupaten

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah PNS per urusan pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Perangkat Daerah atau data kepegawaian BKD.
- 2) Dapatkan pula data jumlah total seluruh PNS per 31 Desember 2017 dari Perangkat

Daerah atau BKD.

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

7. Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan sesuai penjenjangan

Definisi Operasional:

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Thn 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing Perangkat Daerah. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung).
- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

8. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.

Definisi Opeasional:

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Thn 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing Perangkat Daerah.

- (apabila jabatan di isi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung).
- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
 - 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.
9. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah.
- Prosedur Pengisian :
- 1) Dapatkan data dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, RKA) dari masing-masing Perangkat Daerah.
 - 2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang tersedia.
10. Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah.
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data program RKPD per urusan yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah.
 - 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh program RKPD per urusan dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
11. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah.
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah.
 - 2) Dapatkan pula data jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah per urusan.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
12. Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah.
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah.

- 2) Dapatkan pula data jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah per urusan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

13. Total Anggaran Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total anggaran Perangkat Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Dapatkan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

14. Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Dapatkan pula data realisasi total belanja Perangkat Daerah dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15. Realisasi Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja Barang dan Jasa.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Dapatkan pula data realisasi belanja barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

16. Realisasi Belanja Pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Dapatkan pula data total realisasi belanja Perangkat Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

17. Keberadaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk).

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk) dari masing-masing Perangkat Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang tersedia.

18. Adanya Inventaris Barang atau Asset Perangkat Daerah.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca. Dalam akuntansi, termasuk dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP No.24/2005, istilah barang disebut aset. Dalam pelaporan barang di Neraca oleh Perangkat Daerah dan Pemda, istilah barang diganti dengan aset, yang terbagi ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data hasil inventarisasi barang/aset Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 5 tahun sekali.
- 2) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

19. Jumlah Asset yang tidak digunakan.

Asset yang tidak digunakan adalah asset yang dalam kondisi baik tapi tidak dimanfaatkan untuk operasional Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data asset yang tidak digunakan per urusan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam satuan rupiah.
- 2) Dapatkan pula Asset yang dikuasai Perangkat Daerah dalam satuan rupiah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

20. Jumlah fasilitas / prasarana informasi.

Fasilitas/Prasarana informasi adalah bentuk-bentuk informasi yang berupa Papan Pengumuman, Pos Pengaduan, Leaflet, Mobil Keliling dan Pengumuman Mass Media

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data terkait kepemilikan fasilitas/prasarana informasi.
- 2) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

21. Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat.

Definisi Operasional:

Survey Kepuasan Masyarakat yang dimaksud adalah survey kepuasan terhadap suatu layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan (Perangkat Daerah) dengan atau tidak melibatkan pihak akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berguna untuk mengukur kepuasan masyarakat atau keberhasilan suatu layanan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data laporan hasil survey kepuasan dari masing- masing Perangkat Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “ada/tidak ada” pada kolom yang tersedia.

PETUNJUK PENGISIAN
PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN ASPEK TINGKAT
CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KOTA

“Prosedur pengisian untuk menghitung capaian kinerja disajikan hanya sebagian urusan saja sedangkan urusan lainnya dapat mencontoh pada prosedur pengisian yang ada, karena pada prinsipnya untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator kinerja menggunakan prosedur yang sama”.

1. URUSAN PENDIDIKAN

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah anak usia 4–6 tahun dari Dinas Dukcapil.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

2. Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (buta aksara)

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dari Dinas Dukcapil
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

3. Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI Paket A

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI Paket A dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.

- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun;
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
 - 4). Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
4. Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMP/MTs Paket B.
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs Paket B.
 - 2) dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
 - 3) Dapatkan pula data jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun tahun;
 - 4) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
5. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
 - 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
6. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMP/MTs
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
 - 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

7. Angka Kelulusan (AK) jenjang SD/MI

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI yang mengikuti ujian
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

8. Angka Kelulusan (AK) jenjang SMP/MTs

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs yang mengikuti ujian
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

9. Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI, tahun ajaran sebelumnya.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

10. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah guru SD/MI, SMP/MTs
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

2. URUSAN KESEHATAN

11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani.

Definisi Operasional :

Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS dan Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP).

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, Laporan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

12. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Definisi operasional :

Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sumber data berasal dari SIMPUS dan SIRS, tidak termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

13. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Definisi Operasional:

UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 - 11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah desa/kelurahan UCI dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh desa/kelurahan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

14. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

Definisi operasional :

Balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sumber data R-1 /gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W-1 (laporan wabah KLB), laporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau Rumah Sakit.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satuan wilayah kerja pd kurun wkt tertentu dari data SIMPUS, SIRS, laporan R1 Gizi, LB3, laporan gizi buruk dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC, BTA.

Definisi Operasional::

Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus/penderita baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Sumber data Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah Kerja selama 1 thn dari data SIMPUS, SIRS, laporan TB 07,08,11, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

16. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.

Definisi operasional:

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang

ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD (+).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah Kerja selama 1 thn dari data SIMPUS, SIRS, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
 - 2) Dapatkan pula data jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
17. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin.

Definisi Operasional :

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 (puskesmas) di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan pasien miskin (untuk pemeriksaan kesehatan, mendapatkan vitamin, melakukan tensi, dsb) di sarana kesehatan Strata 1 dari data Laporan Dinkes dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
 - 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh miskin di Provinsi yang bersangkutan.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
18. Cakupan Kunjungan Bayi

Definisi Operasional:

Cakupan bayi (anak berumur 29 hari s/d 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. sumber data berasal dari SIMPUS (kohort bayi), SIRS dan klinik.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

19. Penanganan Sampah

Definisi Operasional:

Kriteria penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai volume sampah (M^3), yang ditangani dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai volume produksi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 3) Dapatkan juga data pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dalam 1 hari (M^3).
- 4) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

20. Kebersihan

Definisi Operasional:

Kebersihan yang dimaksud adalah kebersihan dalam pasar tradisional. Kriteria pasar tradisional tergolong baik sesuai Adipura antara lain : pasar sudah memiliki sanitasi, memiliki TPS, pengelompokkan kios pedagang, dan terdapat saluran drainase.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah pasar tradisional tergolong baik berdasarkan kriteria tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah seluruh pasar tradisional yang berada pada Kabupaten yang bersangkutan (menghitung jumlah pasar tradisional dan pasar tradisioanl kriteria Adipura yang berada di kecamatan).
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

21. Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Definisi Operasional:

TPS adalah tempat untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat sementara untuk selanjutnya diteruskan ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Biasanya terdapat dikota kota kecil maupun kota besar, terletak didaerah yang jauh dari pemukiman dan untuk menghindari masyarakat membuang sampah sembarangan sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di kota tersebut.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dari Dinas Lingkungan Hidup per RT/RW/kecamatan atau Dinas yang membidangi pengelolaan Persampahan.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah penduduk yang berada pada kota yang bersangkutan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

22. Penegakan hukum lingkungan

Definisi Operasional:

Penegakan kasus hukum akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau

pengrusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah kasus lingkungan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

23. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Definisi Operasional:

Kriteria bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, nyaman, memiliki drainase, memiliki rambu- rambu lalu lintas, dan memiliki penerangan. Jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang (mantap).Data bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap).
- 2) Dapatkan pula data panjang seluruh jalan kota.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

24. Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik,(tidak perlu di isi).

25. Rumah Tangga Ber Sanitasi

Definisi Operasional:

Kriterianya rumah tangga yang sanitasinya sekurang- kurangnya mempunyai akses fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), pembuangan sampah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga bersanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

26. Kawasan Kumuh

Definisi Operasional:

Kawasan kumuh adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama (tempat permukiman, pemusatan, distribusi pelayanan sosial dan ekonomi) namun tidak sesuai dengan susunan fungsi kawasan. Kawasan kumuh dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria yaitu kepadatan penduduk eksisting, tata letak bangunan, keadaan konstruksi, ventilasi, kepadatan bangunan, keadaan jalan, drainase, pemakaian air bersih, pembuangan limbah manusia, dan pembuangan sampah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai luas kawasan kumuh di kabupaten tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai luas wilayah di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

27. Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan wilayah

Definisi Operasional:

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah. Penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Taman-taman milik Pemda, Hutan Kota yang berada di kota, Daerah Aliran Sungai, Tempat Pemakaman Umum, termasuk Hutan Lindung). Kriteria mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan pula data mengenai jumlah luas RTH yang tersedia di kota tersebut.
- 2) Dapatkan pula luas wilayah daratan,
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

5. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

28. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Definisi Operasional:

Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Kriteria air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari (cuci, mandi dan minum) yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, sumur yang lokasi penampungannya berjarak kurang lebih 20 meter dari septic tank, dan air yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kota tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah tangga di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

29. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Definisi Operasional:

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kota tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah tangga di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

30. Rumah Layak huni

Definisi Operasional:

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria/persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (ada ventilasi, penerangan serta minimal lantai terbuat dari tanah/kayu).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah layak huni di kota tersebut dari Dinas Perumahan atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

6. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

31. Gelanggang/Balai Remaja

Definisi Operasional:

Lokasi yang dipergunakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan/aktivitas seni, tari, dengan skala yang besar yang fasilitasnya milik pemerintah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah gelanggang/balai remaja di kota tersebut dari Dinas Dispora atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh penduduk di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

32. Lapangan Olah Raga

Definisi Operasional:

Lapangan Olah Raga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Setiap jenis olahraga diperlukan sarana lapangan untuk tempat berlangsungnya aktivitas. Secara garis besar beberapa jenis olah raga yang membutuhkan sarana lapangan adalah Bola Voli, Sepak Bola, Basket, dan Badminton serta Kolam Renang.

Untuk setiap jenis lapangan memiliki ukuran atau dimensi yang berbeda-beda.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah lapangan olah raga di kota tersebut dari Dinas Dispora atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh penduduk di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. URUSAN PENANAMAN MODAL

33. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai nilai realisasi PMDN tahun 2017 di kota tersebut dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data nilai realisasi PMDN tahun 2016 di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

8. URUSAN KOPERASI DAN UKM

34. Koperasi Aktif

Definisi Operasional:

Koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Prosedur Kerja:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah koperasi yang masih aktif di kota tersebut dari Dinas atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan data mengenai jumlah koperasi ada di kota tersebut dari Dinas atau unit yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

35. Usaha Makro dan Kecil

Definisi Operasional:

UKM adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tempat usaha.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah usaha mikro dan kecil di kota tersebut dari Dinas atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan data mengenai jumlah UKM yang ada di kota tersebut dari Dinas atau unit yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

9. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

36. Kepemilikan KTP

Definisi Operasional:

Perbandingan penduduk yang telah wajib memiliki KTP terhadap penduduk usia 17 tahun ke atas dan atau sudah/pernah menikah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penduduk yang memiliki KTP di kabupaten tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk wajib KTP (≥ 17 dan atau Pernah/sudah menikah) di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

37. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Definisi Operasional:

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran di kota tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh penduduk di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

38. Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Prosedur Kerja:

1. Dapatkan informasi tentang peraturan KTP berbasis NIK
2. Isikan pada lampiran IKK aspek tingkat capaian.
3. SPM dengan isian "Ada" bila pemda telah memiliki website dan "tidak" bila pemda tidak memiliki website.

10. URUSAN KETENAGAKERJAAN

39. Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Definisi Operasional:

Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja/BPJS Ketenagakerjaan adalah pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja untuk menjamin kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pekerja/buruh yang terdaftar sebagai peserta

jamsostek dari Dinas Tenaga kerja

- 2) Dapatkan pula data pekerja/buruh di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

40. Pencari kerja yang ditempatkan

Definisi Operasional:

Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang telah mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja dan sudah ditempatkan atau diterima kerja.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pencari kerja yang ditempatkan di kota tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (melalui mekanisme Angkatan Kerja Lokal (AKL), Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN).
- 2) Dapatkan pula data pencari kerja yang mendaftar di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

11. URUSAN PANGAN

41. Regulasi Pangan

Prosedur Kerja:

- 1). Dapatkan Regulasi yang mengatur Ketahanan Pangan di Bagian Hukum
- 2). Masukkan data kedalam kolom IKK dengan pernyataan “Ada atau Tidak Ada

42. Ketersediaan Pangan Utama

Definisi Operasional:

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Jenis pangan utama yakni padi, jagung, keledai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) di kota tersebut dari Dinas Ketahanan Pangan/Bulog atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

12. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

43. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Definisi Operasional:

Partisipasi perempuan adalah pekerja/penduduk perempuan usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan di lembaga pemerintah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data pekerja perempuan di lembaga pemerintah di kota tersebut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan atau Dinas Ketenagakerjaan.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah pekerja perempuan (PNS) di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

44. Angka Melek Huruf Perempuan usia 15 thn keatas

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data pekerja perempuan yang melek huruf diatas usia 15 thn di kota tersebut.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah pekerja perempuan diatas usia 15 thn.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

45. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Definisi Operasional:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia

kerja (15-64 thn). Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

Prosedur pengisian :

- 1). Dapatkan data jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di kota tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (sudah memiliki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning).
- 2) Dapatkan pula data jumlah pekerja perempuan atau penduduk perempuan usia 15 s.d 64 tahun di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

13. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

46. Prevalensi KB Aktif

Definisi Operasional:

Proporsi antara jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS). Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah peserta program KB aktif perkecamatan di kota tersebut dari BKKBN.
- 2) Dapatkan pula data jumlah pasangan usia subur (PUS) per kecamatan di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

47. Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan.

Definisi Operasional:

Perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB secara Nasional adalah antara 4-5 desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri Sipil

(PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas,tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB. Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,pelayanan,pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah desa atau kelurahan di kota tersebut dari BKKBN.
- 2) Dapatkan pula data jumlah PLKB atau PKB di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

14. URUSAN PERHUBUNGAN

48. Angkutan darat

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah angkutan darat di kota tersebut dari Dinas Perhubungan atau organda.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penumpang angkutan darat di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

49. Web site Milik Pemerintah Daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan informasi mengenai website milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Bagian Humas (Setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan informatika.
- 2) Isikan pada lampiran suplemen aspek tingkat capaian.
- 3) SPM dengan isian “Ada” bila pemda telah memiliki website dan “tidak” bila pemda tidak memiliki website.

50. Pameran/expo

Definisi Operasional:

Kegiatan Pameran atau Expo yang diselenggarakan oleh pemda baik di daerahnya maupun di daerah lain, baik sebagai peserta atau penyelenggara.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pameran yang diselenggarakan selama tahun 2017 oleh pemda di Bagian Humas (setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan Informatika.
- 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

16. URUSAN PERTANAHAN

51. Lahan bersertifikat

Lahan bersertifikat adalah lahan yang dimiliki pemerintah daerah (bukan lahan umum), **yang telah bersertifikat**.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data luas lahan milik pemda yang seharusnya bersertifikat dan luas lahan yang bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional kota yang bersangkutan.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

52. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Definisi Operasional:

Kasus tanah Negara atau sengketa antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan masyarakat.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data kasus menyangkut permasalahan tanah Negara dan data kasus yang telah terselesaikan di Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

53. Penyelesaian Ijin Lokasi

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data permohonan perijinan lokasi dan data perijinan lokasi yang disetujui di Sekretariat Daerah/PTSP.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

17. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

54. PKK Aktif

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah PKK per desa/kelurahan/ kecamatan yang ada di pemda dan jumlah PKK yang aktif (dibina) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

55. Posyandu

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah posyandu dan jumlah posyandu per desa/kelurahan yang aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

18. URUSAN SOSIAL

56. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Definisi Operasional:

Sarana Sosial yang dimaksud adalah sarana sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sarana sosial di Dinas Sosial.
- 2) Masukan jumlah sarana sosial kolom capaian kinerja dalam satuan buah.

57. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)

Definisi Operasional:

PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan data PMKS yang tertangani di Dinas Sosial.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

58. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dan data PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial di Dinas Sosial.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

19. URUSAN KEBUDAYAAN

59. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Definisi Operasional:

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dimaksud adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan dilengkapi

dengan data dukung (laporan kegiatan dan dokumentasi).

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2016 di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

60. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Definisi Operasional:

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dimaksud adalah gedung/panggung permanen milik pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan seni budaya.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan.

61. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Dinas Pariwisata.
- 2) Masukkan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada kolom capaian kinerja dalam satuan buah.

20. URUSAN STATISTIK

62. Buku "Kota Dalam Angka"

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan buku kabupaten dalam angka tahun 2017 di Kantor Statistik atau Bappeda.
- 2) Masukkan ke kolom capaian kinerja, apabila pemda telah memiliki buku kota dalam angka tahun 2016 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

63. Buku "PDRB Kota"

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan buku PDRB kabupaten tahun 2017 di Kantor Statistik atau Bappeda.
- 2) Masukkan ke kolom capaian kinerja, apabila pemda telah memiliki buku PDRB kota dalam angka tahun 2017 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

21. URUSAN KEARSIPAN

64. Pengelolaan arsip secara baku

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Perangkat Daerah dan jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

65. Peningkatan SDM pengelola pengarsipan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan kepada petugas pengelola pengarsipan di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

22. URUSAN PERPUSTAKAAN

66. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah koleksi judul buku dan koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.

- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

67. Pengunjung perpustakaan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2016 dan jumlah populasi orang yang harus dilayani **usia 4-59 tahun** di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Produksi perikanan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi produksi perikanan baik darat maupun laut (ton) dan data target produksi perikanan (ton) daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

2. Konsumsi ikan

Prosedur pengisian

- 1) Dapatkan data jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg) dan data target ekspor hasil perikanan daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

2. URUSAN PERTANIAN

3. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Definisi Operasional:

Produktifitas padi atau bahan pangan lainnya adalah Jenis bahan pangan utama: padi, jagung, sagu, kedelai, umbi-umbian dalam suatu lahan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dan total luas areal tanaman pada atau bahan pangan utama lokal lainnya di Dinas Pertanian.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2016 dan data PDRB khusus sektor pertanian di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

3. URUSAN PARIWISATA

5. Kunjungan wisata

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara selama tahun 2017 di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

6. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2017 dan data PDRB Harga Yang Berlaku khusus

sektor pariwisata di Kantor Statistik.

- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

4. URUSAN INDUSTRI

7. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2017 dan data PDRB Harga yang Berlaku khusus sektor industri di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

8. Pertumbuhan industri secara keseluruhan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah industri 2017 dan jumlah industri tahun 2016 di Dinas Perindustrian.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

5. URUSAN PERDAGANGAN

9. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2017 dan data PDRB Harga Yang Berlaku khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

10. Ekspor bersih perdagangan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi ekspor (Rp) dan realisasi impor (Rp) di Kantor Statistik atau Dinas Perdagangan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

6. URUSAN TRANSMIGRASI

11. Transmigran swakarsa

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah transmigran dan jumlah transmigran swakarsa di Dinas Transmigrasi.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD

Prosedur pengisian :

- 1) IKK ini capaian kerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan tetapi pernyataan “ada atau tidak ada”);
- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- 3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD

Prosedur pengisian :

- 1) IKK ini capaian kerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan tetapi pernyataan “ada atau tidak ada”);
- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan

data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/ Pernyataan yang diminta.

3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD

Prosedur pengisian :

- 1) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan tetapi pernyataan “ada atau tidak ada”);
- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/ pernyataan yang diminta.
- 3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah program RKPD tahun berkenaan dari Dinas Bappeda atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

5. Sistem Informasi Manajemen Pemda

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah system informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda melalui sekretariat daerah dan BPKD.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah system informasi manajemen pemda yang diimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

6. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data indeks kepuasan layanan masyarakat di sekretariat daerah dan BPKD.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah sistem informasi manajemen pemda yang diimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan pembinaan politik di daerah

Definisi Operasional:

Kegiatan pembinaan politik di daerah adalah kegiatan politik yang dilaksanakan oleh kantor Kesbanglinmas selama tahun 2017 yang dibiayai dengan dana APBD dan dilampirkan laporan pelaksanaan kegiatan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2017 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dalam satuan kali.

2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP:

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM Ormas, dan OKP selama tahun 2016 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam satuan kali.

**PETUNJUK PENGISIAN
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN**

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Keberadaan PERDA IMB

Definisi Operasional:

Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

PP 36/2005 Pasal 112, ayat (1) : "Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung."

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur perizinan tentang izin mendirikan bangunan (bukan perda yang mengatur biaya atau retribusinya).
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

2. Rasio Rumah ber-IMB

Definisi Operasional:

Perbandingan jumlah seluruh rumah yang memiliki IMB dengan jumlah total seluruh rumah di wilayah perkotaan dari tahun pembentukan daerah sampai dengan 31 Desember 2017.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah rumah ber IMB sd. akhir tahun (31 Desember 2017) penyusunan LPPD dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh rumah sd. akhir tahun penyusunan LPPD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

3. Keberadaan PERDA RTRW.

Definisi Operasional:

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Peraturan tentang ketertiban penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang ketertiban penataan ruang.
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

4. Pengurusan E-KTP

Definisi Operasional:

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penertiban Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP pada Dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk yang wajib ber-KTP sampai akhir tahun (31 Desember 2017).
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

5. Biaya KTP

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 79A berbunyi “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- 2) Sebutkan legal formalnya.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

6. Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk.

Definisi Operasional:

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat menjadi PNS, bertugas sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan kententeraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) pada tahun penyusunan LPPD pada Kantor Polisi Pamongpraaja atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk sampai akhir tahun penyusunan LPPD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS.

Definisi Operasional:

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang penanganan PSK,PKL,atau PMKS.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang PSK, PKL, atau PMKS.
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang tersedia.

8. Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota.

Definisi Operasional:

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang kebersihan Kota.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang kebersihan Kota.
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.
- 3) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

2 KESELARASAN DAN EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARA PMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

9. Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007.

Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian LPPD Kabupaten/Kota dari Biro Pemerintah Setda Provinsi.
 - 2) Tuliskan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.
 - 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD.
 - 4) Tuliskan Tepat atau Tidak Tepat
10. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah (APBN/APBD) selama suatu periode, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan (CALK) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian Laporan Keuangan dari Kementerian Keuangan.
- 2) Tuliskan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.

11. Ketepatan waktu Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan.
Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian Lakip dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
- 2) Tuliskan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD sesuai tanda terima.

12. Urusan yang sudah diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data masing-masing indikator SPM yang tertuang dalam program per urusan yang sudah diterapkan SPMnya dalam RKA Perangkat Daerah atau DPA Perangkat Daerah tahun 2017 sebagai elemen data pengisian IKK tersebut.
- 2) Isikan urusan yang sudah diterapkan SPMnya oleh Pemerintah Kota.

13. Kerjasama Dengan Daerah Lain/MOU.

Kesepakatan antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi, antar pemerintah kota dengan pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kota lainnya dalam satu propinsi atau provinsi lainnya yang dibuat secara tertulis.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah MoU atau kerjasama antar daerah yang masih berlaku pada tahun 2017 dari Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota.
- 2) Tuliskan Judul, Nomor beserta tanggal MoU.

14. Kesesuaian Prioritas Pembangunan.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhatikan sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2017 yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah prioritas pembangunan daerah dari Bapedda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2016.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pada APBD tahun 2017. Data berasal dari Bapedda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2016.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

16. Waktu penetapan Perda APBD 2017.

Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (1) Permendagri 37 Tahun 2015 tentang Pedum Penyusunan APBD Tahun 2017 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya”.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada lampiran pengesahan Perda APBD dimaksud.
- 2) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penetapan Perda APBD.

- 3) Tuliskan pernyataan “Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.
17. Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prosedur pengisian:
- 1) Dapatkan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Tuliskan pernyataan “Ada atau Tidak ada” pada kolom yang tersedia.
 - 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah

18. Belanja Untuk Pelayanan Dasar.

Belanja Pelayanan dasar adalah total realisasi belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung dari urusan yang dikategorikan urusan pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Tramtibum dan Linmas, Sosial, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tersebut. Realisasi belanja pelayanan tersebut diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban APBD (Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 sebelum di audit BPK).Sementara khusus untuk urusan pendidikan dan kesehatan, selain diambil dari Perangkat Daerah yang secara teknis menangani urusan tersebut(urusan pendidikan dari dinas pendidikan dan urusan kesehatan dari dinas kesehatan dan RUmah Sakit), realisasi belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan juga ditambahkan dengan jumlah realisasi belanja dari bantuan tunai ke lembaga pendidikan dan kesehatan yang dilaporkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Perangkat Daerah dengan nama lain yang menjalankan fungsi sebagaimana BPKAD.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi belanja pelayanan dasar dari Perda Pertanggungjawaban APBD atau Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 sebelum diaudit oleh BPK (karena Perda Pertanggungjawaban APBD masih menunggu Laporan Keuangan Daerah yang sudah di Audit BPK) untuk masing-masing Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan dasar

- 2) Dapatkan data realisasi bantuan tunai ke lembaga pendidikan dan kesehatan yang dilaporkan ke BPKAD dari Perda Pertanggungjawaban APBD atau Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah sebelum di audit BPK.
- 3) Dapatkan jumlah realisasi belanja Daerah tahun 2017 dari Laporan Keuangan Daerah tahun 2017 sebelum audit BPK
- 4) Tuliskan Belanja per urusan kedalam rumus yang sudah tersedia.
- 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada kolom capaian kinerja.

19. Belanja Untuk Urusan Pendidikan Dan Kesehatan.

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen, termasuk gaji) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundangundangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD dan Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar untuk urusan pendidikan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait.
- 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 3) Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah tersedia.

20. Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik.
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah

lainnya.

21. Rasio PNS terhadap penduduk.

Perbandingan antara jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah provinsi. Idealnya persentase jumlah PNS adalah dua atau tiga persen dari jumlah penduduk.

Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab melaksanakannya.

Di samping variabel jumlah penduduk, faktor luas wilayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN/APDB turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah PNS yang ideal.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah PNS s.d 31 Desember 2017 dari BKD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Penduduk s.d 31 Desember tahun 2017.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

22. Sistem Informasi Kepegawaian

Aplikasi berbasis database yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah yang bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan bukti kepemilikan Sistem Kepegawaian yang dilaksanakan pemerintah daerah dari Badan Kepegawaian Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

23. Jumlah Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan **PP Nomor 18 Tahun 2016**.

Definisi Operasional:

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. **Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah** setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait.
- 2) Isikan dan rinci jumlah per Perangkat Daerah data tersebut pada kolom yang sudah tersedia.

24. Jumlah PERDA yang ditetapkan pada tahun 2017

Definisi Operasional:

Produk Hukum Daerah berdasarkan berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang [Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah \(Ketentuan Pasal 1 ayat 4\)](#). Produk Hukum Daerah diterbitkan oleh kepala daerah dalam pengaturan atau regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah mendapat persetujuan DPRD.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2017 dari Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi.
- 2) Tuliskan nomor dan tanggal perda yang ditetapkan.

25. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017

Definisi Operasional:

Mengacu ayat (2) Pasal 14 Permendagri No. 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017 dari Biro

Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data jumlah rancangan perda-perda yang diusulkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

26. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2017 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD pada tahun 2017 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

27. Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Keputusan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2017 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

28. Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Peraturan walikota yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Peraturan walikota yang dikeluarkan pada tahun 2017 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

29. Jumlah PERDA yang dibatalkan

Definisi Operasional:

Prosedur pembatalan perda diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai perda-perda yang dibatalkan dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data perda-perda yang dikirimkan untuk dievaluasi dari Biro Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

30. Keberadaan PERDA/Perwali terkait dengan konsultasi publik Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah.
- 2) Sebutkan legal formalnya.
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau Perkada lainnya.

31. Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh public (website, kotak pos,

leaflet/brosur).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan bukti kepemilikan media informasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan walikota dari Dinas- Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait.
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

32. Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi Dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula anggaran dana perimbangan (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

33. Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total realisasi belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data realisasi Dana Alokasi Umum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

34. Realisasi Belanja Langsung terhadap total APBD

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi total belanja langsung dalam Laporan Realisasi

Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
35. Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2016 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

36. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2016 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

37. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) terhadap Total Pendapatan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2016 dari BPKAD atau instansi terkait.

- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

38. Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Realisasi belanja APBD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2017 dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

39. Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan Hasil Rekonsiliasi Rekomendasi/Temuan BPK dalam LHP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah tahun anggaran 2017 yang telah tuntas ditindaklanjuti pemda, data didapat dari inspektorat Provinsi atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula jumlah seluruh rekomendasi BPK RI per 31 Desember 2017 dari Inspektorat Provinsi atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

40. Realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2016 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.
- 2) Dapatkan pula data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2015-2019 **untuk proyeksi PAD tahun 2017** dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

41. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total PAD tahun 2017 dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.
- 3) Dapatkan pula data total PAD tahun 2016 dalam LRA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait.
- 4) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

42. Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah, data berasal dari Biro Humas, protokol Setda Pemerintah Provinsi.
- 2) Tuliskan nama dan jenis penghargaan yang diterima pada kolom LPPD.

43. Keberadaan E-procurement

Definisi Operasional:

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan

pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau E-Procurement di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan fotokopi peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa.
- 2) IKK ini capaian kerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan melainkan pernyataan “ada atau tidak ada”).
- 3) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta;
- 4) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

44. Jumlah Persetujuan Investasi

Definisi Operasional:

Persetujuan Investasi adalah Izin investasi yang sudah teregister pada tahun 2017 dan bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilai izin investasinya lebih besar atau sama dengan 200 juta rupiah, yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Data Dituangkan dalam bentuk table yang berisi nama perusahaan, tanggal izin, dan nilai investasi.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah izin investasi/izin prinsip PMDN (nilai izin investasinya \geq 200 juta) yang sudah teregistrasi di PTSP/BPMD.
- 2) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1 Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data program nasional per urusan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan RKP tahun 2017 sebagaimana Perpres 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
- 2) Dapatkan pula data jumlah program nasional per urusan yang sudah ditetapkan Pemerintah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

2 Keberadaan Standard Operating Procedur (SOP)

Definisi Operasional:

SOP yang dimaksud adalah SOP teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq.Kementerian/LPNK dari masing-masing, Perangkat Daerah tidak termasuk SOP yang rutin.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jenis SOP teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian/LPNK dari masing-masing Perangkat Daerah (dalam bentuk rekapitulasi).
- 2) Dipilih berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 3) Tuliskan Judul SOP pada kolom yang tersedia.

2. KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data Perda-Perda yg dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah per urusan berdasarkan Peraturan Menteri terkait.
- 2) Dapatkan pula jumlah Seluruh Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

3. PENATAAN KELEMBAGAAN

4 Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering Yang Terisi

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah jabatan yang ada (yang diisi) per urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada masing-masing Perangkat Daerah. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung).
- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 2) Yang dihitung adalah nama jabatan fungsional, bukan jumlah pemangku jabatan.
- 3) Pilihlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja.
- 4) Tuliskan nama jabatan fungsional pada kolom yang tersedia.

4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

6 Rasio PNS Kabupaten

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah PNS per urusan pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Perangkat Daerah atau data kepegawaian BKD.
- 2) Dapatkan pula data jumlah total seluruh PNS per 31 Desember 2017 dari Perangkat Daerah atau BKD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

- 7 Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan sesuai penjejang.

Definisi Operasional:

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Thn 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing Perangkat Daerah. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung).
- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

- 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Thn 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing Perangkat Daerah. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung).
- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

- 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, RKA) dari masing-masing Perangkat Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang tersedia.

- 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data program RKPD per urusan yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh program RKPD per urusan dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

11. Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA dari Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data Program Renja per urusan yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah.
- 2) Dapatkan pula data jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah per urusan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

- 12 Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 5) Dapatkan data Program RENJA RKPD per urusan yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah.
- 6) Dapatkan pula data jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah per urusan.
- 7) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 8) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

13 Total Anggaran Perangkat Daerah terhadap Total Belanja APBD

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total anggaran Perangkat Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Dapatkan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

14 Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Perangkat Daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Dapatkan pula data realisasi total belanja Perangkat Daerah dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15 Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2) Dapatkan pula data realisasi belanja barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

16 Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - 2) Dapatkan pula data total realisasi belanja Perangkat Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 17 Keberadaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk).

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk) dari masing-masing Perangkat Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang tersedia.

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- 18 Adanya Inventaris Barang atau Asset Perangkat Daerah.

Definisi Operasional:

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca. Dalam akuntansi, termasuk dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP No.24/2005, istilah barang disebut aset. Dalam pelaporan barang di Neraca oleh Perangkat Daerah dan Pemda, istilah barang diganti dengan aset, yang terbagi ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data hasil inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 5 tahun sekali.
- 2) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

19 Jumlah Asset yang tidak digunakan.

Definisi Operasional:

Asset yang tidak digunakan adalah asset yang dalam kondisi baik tapi tidak dimanfaatkan untuk operasional Perangkat Daerah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data asset yang tidak digunakan per urusan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam satuan rupiah.
- 2) Dapatkan pula Asset yang dikuasai Perangkat Daerah dalam satuan rupiah.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi.

Definisi Operasional

Fasilitas/Prasarana informasi adalah bentuk-bentuk informasi yang berupa Papan Pengumuman, Pos Pengaduan, Leaflet, Mobil Keliling dan Pengumuman Mass Media

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data terkait kepemilikan fasilitas/prasarana informasi.
- 2) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat.

Definisi Operasional:

Survey Kepuasan Masyarakat yang dimaksud adalah survey kepuasan terhadap suatu layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan (Perangkat Daerah) dengan atau tidak melibatkan pihak akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berguna untuk mengukur kepuasan masyarakat atau keberhasilan suatu layanan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data laporan hasil survey kepuasan dari masing- masing Perangkat Daerah.
- 2) Tuliskan pernyataan “ada/tidak ada” pada kolom yang tersedia.

PETUNJUK PENGISIAN
PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN ASPEK TINGKAT
CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KOTA

“Prosedur pengisian untuk menghitung capaian kinerja disajikan hanya sebagian urusan saja sedangkan urusan lainnya dapat mencontoh pada prosedur pengisian yang ada, karena pada prinsipnya untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator kinerja menggunakan prosedur yang sama”.

1. URUSAN PENDIDIKAN

1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah anak usia 4–6 tahun dari Dinas Dukcapil.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

2 Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (buta aksara)

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dari Dinas Dukcapil
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

3 Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SD/MI Paket A

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI Paket A dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.

- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun;
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 4 Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni (APK/APM) SMP/MTs Paket B.
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs Paket B.
 - 2) dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
 - 3) Dapatkan pula data jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun tahun;
 - 4) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 5 Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
 - 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
- 6 Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMP/MTs
- Prosedur pengisian :
- 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
 - 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya.
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

7 Angka Kelulusan (AK) jenjang SD/MI

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI yang mengikuti ujian
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

8 Angka Kelulusan (AK) jenjang SMP/MTs

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs yang mengikuti ujian
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

9 Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI, tahun ajaran sebelumnya.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

10 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah guru SD/MI, SMP/MT
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

2. URUSAN KESEHATAN

11 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Definisi Operasional :

Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS dan Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP).

Prosedur pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, Laporan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Definisi operasional :

Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sumber data berasal dari SIMPUS dan SIRS, tidak termasuk pelayanan yang

dilakukan oleh swasta.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

13 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Definisi Operasional:

UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 - 11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah desa/kelurahan UCI dari data SIMPUS, SIRS dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh desa/kelurahan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

Definisi operasional :

balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sumber data R-1 /gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W-1 (laporan wabah KLB), laporan KLB gizi buruk

Puskesmas, dan atau Rumah Sakit.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satuan wilayah kerja pd kurun wkt tertentu dari data SIMPUS, SIRS, laporan R1 Gizi, LB3, laporan gizi buruk dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA.

Definisi Operasional:

Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus/penderita baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Sumber data Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penderita baru TBC, BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah Kerja selama 1 thn dari data SIMPUS, SIRS, laporan TB 07,08,11, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah perkiraan penderita baru TBC, BTA (+) dalam kurun waktu yang sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.

Definisi operasional:

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Sumber data berasal dari SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD (+).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah Kerja selama 1 thn dari data SIMPUS, SIRS, Laporan W2, Form pelacakan FP.1 dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

17 Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin.

Definisi Operasional :

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin (untuk periksa kesehatan, mendapatkan vitamin, melakukan tensi, dsb) di sarana kesehatan strata 1 (puskesmas) di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 dari data Laporan Dinkes dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh maskin di Provinsi yang bersangkutan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

18 Cakupan kunjungan bayi

Definisi Operasional:

Cakupan bayi (anak berumur 29 hari s/d 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. sumber data berasal dari SIMPUS (kohort bayi), SIRS dan

klirik.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dari data SIMPUS, SIRS, dan data lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

19. Penanganan Sampah

Definisi Operasional:

Kriteria penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai volume sampah (M^3).yang ditangani dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai volume produksi sampah dari Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 3) Dapatkan juga data pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dalam 1 hari (M^3).
- 4) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

20 Kebersihan

Definisi Operasional:

Kebersihan yang dimaksud adalah kebersihan dalam pasar tradisional. Kriteria pasar tradisional tergolong baik sesuai Adipura antara lain : pasar sudah memiliki sanitasi, memiliki TPS, pengelompokkan kios pedagang, dan terdapat saluran

drainase.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah pasar tradisional tergolong baik berdasarkan kriteria tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah seluruh pasar tradisional yang berada pada Kabupaten yang bersangkutan (menghitung jumlah pasar tradisional dan pasar tradisioanl kriteria Adipura yang berada di kecamatan).
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

21 Tempat pembuangan sampah (TPS)

Definisi Operasional:

TPS adalah tempat untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat sementara untuk selanjutnya diteruskan ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Biasanya terdapat dikota kota kecil maupun kota besar, terletak didaerah yang jauh dari pemukiman dan untuk menghindari masyarakat membuang sampah sembarangan sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di kota tersebut.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dari Dinas Lingkungan Hidup per RT/RW/kecamatan atau Dinas yang membidangi pengelolaan Persampahan.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah penduduk yang berada pada kota yang bersangkutan.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

22 Penegakan hukum lingkungan

Definisi Operasional:

Penegakan kasus hukum akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah kasus lingkungan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda atau unit yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

4 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

23 Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Definisi Operasional:

Kriteria bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, nyaman, memiliki drainase, memiliki rambu- rambu lalu lintas, dan memiliki penerangan. Jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang (mantap). Data bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap).
- 2) Dapatkan pula data panjang seluruh jalan kota.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

24 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

- 1) Dapatkan data mengenai luas irigasi dalam kondisi baik dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait;

- 2) Dapatkan pula data mengenai luas irigasi di kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

25 Rumah Tangga Ber Sanitasi

Definisi Operasional:

Kriterianya rumah tangga yang sanitasinya sekurang- kurangnya mempunyai akses fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), pembuangan sampah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga bersanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

26 Kawasan Kumuh

Definisi Operasional:

Kawasan kumuh adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama (tempat permukiman, pemusatan, distribusi pelayanan sosial dan ekonomi) namun tidak sesuai dengan susunan fungsi kawasan. Kawasan kumuh dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria yaitu kepadatan penduduk eksisting, tata letak bangunan, keadaan konstruksi, ventilasi, kepadatan bangunan, keadaan jalan, drainase, pemakaian air bersih, pembuangan limbah manusia, dan pembuangan sampah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai luas kawasan kumuh di kabupaten tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data mengenai luas wilayah di kabupaten tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

27 Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan wilayah

Definisi Operasional:

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah. Penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Taman-taman milik Pemda, Hutan Kota yang berada di kota, Daerah Aliran Sungai, Tempat Pemakaman Umum, Termasuk Hutan Lindung). Kriteria mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan pula data mengenai jumlah luas RTH yang tersedia di kota tersebut.
- 2) Dapatkan pula luas wilayah daratan,
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

5. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

28 Rumah tangga pengguna air bersih

Definisi Operasional:

Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Kriteria air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari (cuci, mandi dan minum) yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, sumur yang lokasi penampungannya berjarak kurang lebih 20 meter dari septic tank, dan air yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kota tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit

yang terkait.

- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah tangga di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

29 Lingkungan Pemukiman Kumuh

Definisi Operaasional:

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga pengguna air bersih di kota tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah tangga di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

30 Rumah Layak huni

Definisi Operasional:

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria/persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (ada ventilasi, penerangan serta minimal lantai terbuat dari tanah/kayu).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah layak huni di kota tersebut dari Dinas Perumahan atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

6. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

31 Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)

Lokasi yang dipergunakan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas seni, tari, dsb yang fasilitasnya milik pemerintah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah gelanggang/balai remaja di kota tersebut dari Dinas Dispora atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh penduduk di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

32 Lapangan Olah Raga

Definisi Operasional:

Lapangan Olah Raga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Setiap jenis olahraga diperlukan sarana lapangan untuk tempat berlangsungnya aktivitas. Secara garis besar beberapa jenis olah raga yang membutuhkan sarana lapangan adalah Bola Voli, Sepak Bola, Basket, dan Badminton serta Kolam Renang.

Untuk setiap jenis lapangan memiliki ukuran atau dimensi yang berbeda-beda.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah lapangan olah raga di kota tersebut dari Dinas Dispora atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh penduduk di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

7. URUSAN PENANAMAN MODAL

33 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data mengenai nilai realisasi PMDN tahun 2017 di kota tersebut

dari Dinas Penanaman Modal, PTSP atau unit yang terkait.

- 2) Dapatkan pula data nilai realisasi PMDN tahun 2016 di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

8. URUSAN KOPERASI DAN UKM

34 Koperasi Aktif

Definisi Operasional:

Koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Prosedur Kerja:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah koperasi yang masih aktif di kota tersebut dari Dinas atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan data mengenai jumlah koperasi ada di kota tersebut dari Dinas atau unit yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

35 Usaha Makro dan Kecil

Definisi Operasional:

UKM adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tempat usaha.

Prosedur Kerja :

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah usaha mikro dan kecil di kota tersebut dari **Dinas atau unit yang terkait.**
- 2) Dapatkan data mengenai jumlah UKM yang ada di kota tersebut dari Dinas atau unit yang terkait.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya

9 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

36 Kepemilikan KTP

Definisi Operasional:

Perbandingan penduduk yang telah wajib memiliki KTP terhadap penduduk usia 17 tahun ke atas dan atau sudah/pernah menikah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penduduk yang memiliki KTP di kabupaten tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk wajib KTP (≥ 17 dan atau Pernah/sudah menikah) di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

37 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Definisi Operasional:

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran di kota tersebut dari Dinas/Bagian Dukcapil, atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh penduduk di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

38 Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Prosedur Kerja:

- 1) Dapatkan informasi tentang peraturan KTP berbasis NIK

- 2) Isikan pada lampiran IKK aspek tingkat capaian.
- 3) SPM dengan isian “Ada” bila pemda telah memiliki website dan “tidak” bila pemda tidak memiliki website.

10 URUSAN KETENAGAKERJAAN

39 Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Definisi Operasional:

Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja/BPJS Ketenagakerjaan adalah pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja untuk menjamin kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pekerja/buruh yang terdaftar sebagai peserta jamsostek dari Dinas Tenaga kerja
- 2) Dapatkan pula data pekerja/buruh di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

40 Pencari kerja yang ditempatkan

Definisi Operasional:

Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang telah mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja dan sudah ditempatkan atau diterima kerja.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pencari kerja yang ditempatkan di kota tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (melalui mekanisme Angkatan Kerja Lokal (AKL), Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN).
- 2) Dapatkan pula data pencari kerja yang mendaftar di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

11 URUSAN PANGAN

41 Regulasi Pangan

Prosedur Kerja:

- 1). Dapatkan Regulasi yang mengatur Ketahanan Pangan di Bagian Hukum
- 2). Masukkan data kedalam kolom IKK dengan pernyataan “Ada atau Tidak Ada

42 Ketersediaan Pangan Utama

Definisi Operasional:

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Jenis pangan utama yakni padi, jagung, keledai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) di kota tersebut dari Dinas Ketahanan Pangan/Bulog atau unit yang terkait.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

12 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

43 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Definisi Operasional:

Partisipasi perempuan adalah pekerja/penduduk perempuan usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan dilembaga pemerintah.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data pekerja perempuan di lembaga pemerintah di kota tersebut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan atau Dinas Ketenagakerjaan.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah pekerja perempuan (PNS) di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

44 Angka Melek Huruf Perempuan usia 15 thn keatas

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data pekerja perempuan yang melek huruf diatas usia 15 thn di kota tersebut.
- 2) Dapatkan pula data Jumlah pekerja perempuan diatas usia 15 thn.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

45 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Definisi Operasional:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja (15-64 thn). Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di kota tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (sudah memiliki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning).
- 2) Dapatkan pula data jumlah pekerja perempuan atau penduduk perempuan usia 15 s.d 64 tahun di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

13 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

46 Prevalensi KB Aktif

Definisi Operasional:

Proporsi antara jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS). Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni;

dibawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah peserta program KB aktif perkecamatan di kota tersebut dari BKKBN.
- 2) Dapatkan pula data jumlah pasangan usia subur (PUS) per kecamatan di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

47 Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan.

Definisi Operasional:

Perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB secara Nasional adalah antara 4-5 desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas,tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB. Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan,pelayanan,pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah desa atau kelurahan di kota tersebut dari BKKBN.
- 2) Dapatkan pula data jumlah PLKB atau PKB di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

14 URUSAN PERHUBUNGAN

48 Angkutan darat

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah angkutan darat di kota tersebut dari Dinas Perhubungan atau organda.
- 2) Dapatkan pula data jumlah penumpang angkutan darat di kota tersebut.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

49 Web site milik pemerintah daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan informasi mengenai website milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Bagian Humas (Setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan informatika.
- 2) Isikan pada lampiran suplemen aspek tingkat capaian.
- 3) SPM dengan isian “Ada” bila pemda telah memiliki website dan “tidak” bila pemda tidak memiliki website.

50 Pameran/expo

Kegiatan Pameran atau Expo yang diselenggarakan oleh pemda baik di daerahnya maupun di daerah lain (Penyelenggara).

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pameran yang diselenggarakan selama tahun 2017 oleh pemda di Bagian Humas (setda) atau Dinas/Badan/Kantor Komunikasi dan Informatika.
- 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

16 URUSAN PERTANAHAN

51 Lahan bersertifikat

Lahan bersertifikat adalah lahan yang dimiliki pemerintah daerah (bukan lahan umum), yang telah bersertifikat.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data luas lahan milik pemda yang seharusnya bersertifikat dan luas lahan yang bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional kota yang bersangkutan.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada .
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

52 Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Definisi Operasional:

Kasus tanah Negara atau sengketa antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan masyarakat.

Prosedur pengisian :

- 4) Dapatkan data kasus menyangkut permasalahan tanah Negara dan data kasus yang telah terselesaikan di Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan.
- 5) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 6) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

53 Penyelesaian Ijin Lokasi

Prosedur pengisian :

- 4) Dapatkan data permohonan perijinan lokasi dan data perijinan lokasi yang disetujui di Sekretariat Daerah/PTSP.
- 5) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 6) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

17 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

54 PKK Aktif

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah PKK per desa/kelurahan/ kecamatan yang ada di pemda dan jumlah PKK yang aktif (dibina) di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

55 Posyandu

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah posyandu dan jumlah posyandu per desa/kelurahan yang aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Isikan perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

18 URUSAN SOSIAL

56. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Definisi Operasional:

Sarana Sosial yang dimaksud adalah sarana sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah, atau milik swasta yang mendapatkan bantuan dari Pemda.

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sarana sosial di Dinas Sosial.
- 2) Masukkan jumlah sarana sosial kolom capaian kinerja dalam satuan buah.

57. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan data PMKS yang tertangani di Dinas Sosial.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

58. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dan data PMKS yang telah memperoleh bantuan sosial di Dinas Sosial.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

19 URUSAN KEBUDAYAAN

59 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Definisi Operasional:

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dimaksud adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan data dukung (laporan kegiatan dan dokumentasi).

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2016 di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan hasil perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

60. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Definisi Operasional:

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dimaksud adalah gedung/panggung permanen milik pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan seni budaya.

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan.

61. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Dinas Pariwisata.
- 2) Masukkan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada kolom capaian kinerja dalam satuan buah.

20 URUSAN STATISTIK

62. Buku "kota dalam angka"

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan buku kabupaten dalam angka tahun 2016 di Kantor Statistik atau Bappeda.
- 2) Masukkan ke kolom capaian kinerja, apabila pemda telah memiliki buku kota dalam angka tahun 2016 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

63. Buku "PDRB kota"

Prosedur Pengisian :

- 1) Dapatkan buku PDRB kabupaten tahun 2016 di Kantor Statistik atau Bappeda.
- 2) Masukkan ke kolom capaian kinerja, apabila pemda telah memiliki buku PDRB kota dalam angka tahun 2016 isikan "Ada" dan apabila belum isikan "Tidak".

21 URUSAN KEARSIPAN

64. Pengelolaan arsip secara baku

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah Perangkat Daerah dan jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan

persentase.

65. Peningkatan SDM pengelola pengarsipan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan kepada petugas pengelola pengarsipan di Kantor arsip daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

22 URUSAN PERPUSTAKAAN

66. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah koleksi judul buku dan koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

67. Pengunjung perpustakaan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2016 dan jumlah populasi orang yang harus dilayani **usia 4-59 tahun** di perpustakaan daerah.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

URUSAN PILIHAN

1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Produksi perikanan

Prosedur pengisian :

- 4) Dapatkan data jumlah realisasi produksi perikanan baik darat maupun laut (ton) dan data target produksi perikanan (ton) daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan.
- 5) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 6) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

2. Konsumsi ikan

Prosedur pengisian

- 4) Dapatkan data jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg) dan data target ekspor hasil perikanan daerah di Dinas Perikanan dan Kelautan.
- 5) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 6) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

2 URUSAN PERTANIAN

3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Definisi Operasional:

Produktifitas padi atau bahan pangan lainnya adalah Jenis bahan pangan utama: padi, jagung, sagu, kedelai, umbi-umbian dalam suatu lahan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dan total luas areal tanaman pada atau bahan pangan utama lokal lainnya di Dinas Pertanian.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Prosedur pengisian :

- 4) Dapatkan data total PDRB tahun 2016 dan data PDRB khusus sektor pertanian di Kantor Statistik.
- 5) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 6) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

3 URUSAN PARIWISATA

5. Kunjungan wisata

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara selama tahun 2017 di Dinas Pariwisata.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

6. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2017 dan data PDRB khusus sektor pariwisata di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

4 URUSAN PERINDUSTRIAN

7 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2016 dan data PDRB khusus sektor industri di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.

- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

8 Pertumbuhan industri secara keseluruhan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah industri 2017 dan jumlah industri tahun 2016 di Dinas Perindustrian.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

5. URUSAN PERDAGANGAN

9 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2017 dan data PDRB khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

10 Ekspor bersih perdagangan

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data realisasi ekspor (Rp) dan realisasi impor (Rp) di Kantor Statistik atau Dinas Perdagangan.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

6. URUSAN TRANSMIGRASI

11 Transmigran swakarsa

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah transmigran dan jumlah transmigran swakarsa di Dinas Transmigrasi.
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada.
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD

Prosedur pengisian :

- 4) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan tetapi pernyataan “ada atau tidak ada”);
- 5) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- 6) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD

Prosedur pengisian :

- 4) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan tetapi pernyataan “ada atau tidak ada”);
- 5) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- 6) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD

Prosedur pengisian :

- 1) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan tetapi pernyataan “ada atau tidak ada”);

- 2) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta.
- 3) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.
4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP Prosedur pengisian:
 - 5) Dapatkan data mengenai Jumlah program RKPDP tahun berkenaan dari Dinas Bappeda atau unit yang terkait.
 - 6) Dapatkan pula data mengenai Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.
 - 7) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
 - 8) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.
5. Sistem Informasi Manajemen Pemda
 Prosedur Pengisian :
 - 1) Dapatkan data jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda melalui sekretariat daerah dan BPKD.
 - 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah system informasi manajemen pemda yang diimplementasikan di pemda dalam satuan buah.
6. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
 Prosedur Pengisian :
 - 1) Dapatkan data indeks kepuasan layanan masyarakat di sekretariat daerah dan BPKD.
 - 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah sistem informasi manajemen pemda yang diimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan pembinaan politik di daerah
 Definisi Operasional:
 Kegiatan pembinaan politik di daerah adalah kegiatan politik yang dilaksanakan oleh kantor Kesbanglinmas selama tahun 2017 yang dibiayai dengan dana APBD dan dilampirkan laporan pelaksanaan kegiatan
 Prosedur pengisian :
 - 1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2017 di Kantor Kesbanglinmas.

2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dalam satuan kali.

2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP:

Prosedur pengisian :

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM Ormas, dan OKP selama tahun 2016 di Kantor Kesbanglinmas.
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam satuan kali.

